

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA
SUKARATU KECAMATAN CIKEUSAL
KABUPATEN SERANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
Pada Program Studi Administrasi Negara



Oleh :

MUKHTIADI
NIM. 6661072816

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2014**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUKHTIADI

NIM : 6661072816

Tempat Tanggal Lahir : Serang, 6 Juni 1988

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pembangunan Fisik Di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang** adalah hasil karya saya sendiridan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaaan saya bisa dicabut.

Serang, Juni 2014



Mukhtiadi

LEMBAR PERSETUJUAN

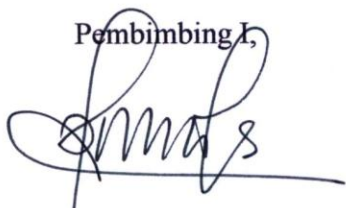
NAMA : MUKHTIADI
NIM : 6661072816
JUDUL : PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA
SUKARATU KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN
SERANG

Serang, Juni 2014

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

Pembimbing II,



Juliannes Cadith, S.Sos, M.Si
NIP. 197207132009121001

Mengetahui,
Dekan Fisip Untirta



Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUKHTIADI
NIM : 6661072816
JUDUL : PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA
SUKARATU KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN
SERANG

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 1 Bulan
Juli tahun 2014 dan dinyatakan **LULUS**

Serang, 1 Juli 2014

Ketua Penguji :

(Rina Yulianti, S.IP., M.Si)
NIP. 197407052006042011


.....


Anggota :

(Dr. Agus Sjaafari, S.Sos., M.Si)
NIP. 197108242005011002

.....

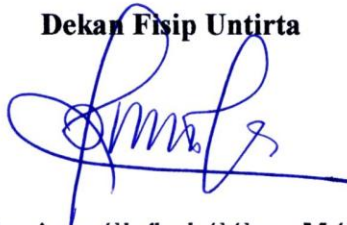
Anggota :

(Rini Handayani, S.Si., M.Si.)
NIP. 197601062006042007


.....

mengetahui

Dekan Fisip Untirta



Dr. Agus Sjaafari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

**Ketua Prodi Ilmu Administrasi
Negara Fisip Untirta**



Rina Yulianti, S.IP., M.Si
NIP. 197407052006042011

ABSTRAK

MUKHTIADI (NIM. 6661072816), 2014, “ **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pembangunan Fisik Di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang**, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu administrasi Negara , Pembimbing I : Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si dan Pembimbing II : **Juliannes Cadith, S.Sos, M.Si**

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat dan Keberhasilan Pembangunan Fisik

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap program pembangunan baik yang bersifat fisik maupun sosial. Pembangunan tidak akan tercapai tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Pemerintah mempunyai dana yang digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan tetapi tidak akan pernah terwujud apabila masyarakat tidak diikutsertakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun pemanfaatan hasil pembangunan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dan keberhasilan pembangunan yang bertujuan *pertama* Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, *kedua* Untuk mengetahui pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang dan *ketiga* Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. Metode yang digunakan adalah metode asosiatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling dengan cara slovin dengan sampel 91 sampel. Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan angket. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal kontribusi partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan fisik sebesar 76,9% sedangkan sisanya merupakan faktor usia, jenis kelamin, pendidikan dan pemerintahan yang terbuka, bertanggungjawab dan berkesinambungan

ABSTRACT

MUKHTIADI (NIM. 6661072816), 2014, "Effects of Success Against Public Participation Physical Development In Rural Sukaratu Cikeusal District of Serang, Serang Tirtayasa Ageng Sultan University, Faculty of Social and Political Sciences, State Administration Science Program, , 1st Advisor: Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si and 2st Advisor: Juliannes Cadith, S. Sos, M.Si

Keywords: Public Participation and Physical Development Success

Public participation is needed in any development program both physically and socially. Development can not be achieved without the participation of the community. The Government has used the funds for the implementation of development programs but will never be achieved if society is not included in the planning, implementation, evaluation and utilization of development. This research was conducted in the village of Serang Cikeusal Sukaratu the District relating to Public Participation and the successful development of the first aims to determine the level of community participation in village Sukaratu Cikeusal District of Serang, both to determine the physical construction in the Village Sukaratu Cikeusal District of Serang and the third to know influence of public participation in the physical development in the Village Sukaratu Cikeusal District of Serang. The method used is an associative method, which is a study that aims to determine the relationship between two or more variables. In this study using sampling techniques in a way Slovin with samples 91 samples. The researchers used techniques in data collection are interviews, observation and questionnaires. The conclusion of this study a significant difference between participation to the success of physical development in the Village District of Cikeusal Sukaratu participation contributed to the success of physical pemangunan by 76.9% while the rest is a factor of age, gender, education and government that is open, responsible and sustainable

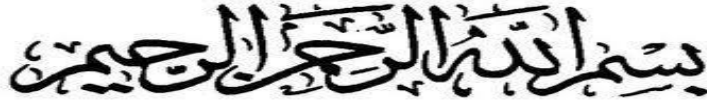
LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO:

*Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap
(Q.S Alam Nasyrak, ayat 6 – 8)*

Skripsi ini kupersembahkan untuk ayah, ibu, kakakku tercinta terutama Mulyani, SE, MM, Ipang Kurnia, dan Murneati, S.Pd. yang telah memberikan dorongan baik moriil maupun materiil sehingga terselesaikannya skripsi ini serta Dela Mukhtiani tersayang.

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum warrahmatullahi wabarakatun

Puji syukur selalu saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta tak lupa juga kita yang senantiasa selalu *istiqomah* dan ikhlas untuk menjadi umatnya dan atas berkat rahmat, karunia, dan ridho-Nya pula peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Terima Kasih untuk Bapak dan Mama tercinta yang telah memberikan dukungannya selama ini baik secara moril dan materil, bantuan dan dorongan dalam upaya menyelesaikan penelitian ini, serta doa yang tulus dan ikhlas kepada peneliti. Terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan kalian.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Keberhasilan Pembangunan Fisik di Desa Sukaratu kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang”. Hasil skripsi ini tentunya tak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung peneliti secara moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Sc selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. DR. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan mengarahkan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Mia Dwiana, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Gandung Ismanto, S.Sos., MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6. Rina Yulianti, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
7. Anis Fuad, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng.
8. Juliannes Cadith, S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Terima kasih saya ucapkan untuk dosen-dosen Ilmu Adminstrasi Negara yang selalu saya banggakan, Titi Setiawati, S.Sos.,M.Si, listyaningsih, S.Sos, M.Si, Rahmawati, S.Sos.,M.Si, Rini Handayani, S,Si., M.Si, Ipah Jumiati, S.IP, M.Si, Yeni Widyastuti, S.Sos. M.Si, Abdul Hamid, S.Sos., M.Si, Drs. H.

Oman Supriyadi, M.Si, DR. H. Asnawi Sjarbini, MPA, DR. Suwaib Amirudin, M.Si, Drs. Hasuri, SE. M.Si, Leo Agustino, M.Si, Ph.D, Ayuning Budiati, S.IP, MPPM, Kristian Widya Wicaksana, S.Sos, M.Si, Ima Maisyaroh, S.Ag, M.Si, Arenawati, S.Sos, M.Si, Deden M. Haris, S.Sos, M.Si, Riswanda, S.Sos, MPA, Juliannes Cadith, S.Sos, M.Si, Atoullah, S.Sos. M.Si, serta dosen-dosean baru yang tidak bisa saya sebutkan, terimakasih untuk semua ilmu yang telah kalian berikan kepada saya.

10. Terima kasih untuk kedua orang tua saya Bapak Japi (Almarhum) dan Ibu Sunariyah yang telah memberikan doa dan semangat tiada henti untuk dapat terselesaikannya skripsi ini.
11. Terima kasih buat ketujuh kakaku terutama Mulyani SE, M.Si, Ipang Kurnia, dan Murnaeti, S.Pd yang telah memberikan semangat tiada henti
12. Dela Mukhtiani yang telah memberikan semangat tiada henti
13. Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah banyak membantu, mohon maaf jika ada salah kata dan sikap.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis sangat berterima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga apa yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT.

Tidak lupa penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Penulis memohon kritik dan saran yang dapat membawa skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini

dapat dilanjutkan menjadi sebuah skripsi yang dapat bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang membaca dan penulis khususnya.

Serang, Mei 2014

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Batasan Masalah	12
1.4. Perumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Penelitian	13
1.6. Kegunaan Penelitian	13
1.7. Sistematika Penulisan	14
Bab II Tinjauan Teori	17
2.1. Kajian Pustaka	17
2.1.1. Partisipasi Masyarakat	17
2.1.1.1 Pengertian Partisipasi	17
2.1.1.2 Pengertian Masyarakat	19
2.1.1.3 Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	21
2.1.2. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat.....	22

2.1.3.	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	24
2.1.4.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	26
2.1.5.	Pengertian Pembangunan.....	29
2.1.6.	Pembangunan Infrastruktur dan Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur	32
2.1.6.1.	Pengertian Pembangunan Infrastruktur	32
2.1.6.2.	Indikator Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	36
2.1.6.3.	Pembangunan Pedesaan	39
2.2.	Kerangka Pemikiran	46
2.3.	Hipotesis Penelitian	54
Bab III	Metodologi Penelitian	56
3.1.	Metode Penelitian	56
3.2.	Instrumen Penelitian	57
3.2.1.	Sumber dan Jenis Data	57
3.2.2.	Definisi Operasional	57
3.3.	Teknik Pengumpulan Data	60
3.4.	Teknik Pengujian Instrumen Penelitian.....	61
3.4.1.	Uji Validitas.....	61
3.4.2.	Uji Reliabilitas.....	61
3.4.3.	Uji Normalitas	62
3.5.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	63
3.5.1.	Populasi	63

3.5.2. Sampel	63
3.6. Metode Pengolahan Data	64
3.6.1. Analisis Regresi	64
3.6.2. Rancangan Uji Hipotesis Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Fisik	65
3.6.3. Koefisien Determinasi.....	67
3.7. Lokasi dan jadwal penelitian	67
Bab IV Hasil dan Pembahasan	69
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian	69
4.1.1. Letak Geografis Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang	69
4.1.2. Jumlah Penduduk Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal	69
4.1.3. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.....	71
4.1.4. Mata pencaharian penduduk Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.....	72
4.1.5. Penggunaan Lahan	73
4.1.6. Fasilitas Lembaga Pendidikan	74
4.2. Karakteristik Responden	74
4.3. Tanggapan Responden	78
1. Tanggapan responden terhadap pernyataan variable X (partisipasi masyarakat) di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.....	78

2. Tanggapan responden terhadap pernyataan variable Y (Keberhasilan pembangunan fisik) di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.....	91
4.4. Uji Instrumen.....	102
1. Uji Validitas	102
2. Uji Reliability	105
3. Uji Normalitas	105
4.5. Analisis Regresi	106
4.6. Koefisien Determinasi	108
4.7. Rancangan uji hipotesis	108
4.8. Pembahasan	111
Bab V Penutup	115
5.1. Kesimpulan	115
5.2. Saran-saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Operasional Variabel	61
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	70
Tabel 4.1. Jumlah Pendudukan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	72
Tabel 4.2. Jumlah Pendudukan Berdasarkan Tingkat Usia.....	73
Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sukaratu Kec.Cikeusal ..	74
Tabel 4.4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukaratu Kec.Cikeusal	75
Tabel 4.5. Penggunaan Lahan Desa Sukaratu Kec.Cikeusal.....	76
Tabel 4.6. Lembaga Pendidikan di Desa Sukaratu Kec.Cikeusal	77
Tabel 4.7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	77
Tabel 4.8. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia	78
Tabel 4.9. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	79
Tabel 4.10. Karakteristik Responden Berdasarkan Mata Pencaharian	80
Tabel 4.11. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan Pembangunan Fisik	81
Tabel 4.12. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pengambilan Keputusan Melibatkan Masyarakat.....	82
Tabel 4.13. Tingkat Partisipasi Masyarakat Mengenai Jumlah Anggaran Yang Diberikan Pemerintah	83
Tabel 4.14. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbangkan Materiil Atau Uang	84
Tabel 4.15. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbangkan Tenaga...85	85
Tabel 4.16. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Bergotong Royong Menyelesaikan Pembangunan Fisik.....	86
Tabel 4.17. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Kegiatan Pembangunan Fisik.....	87
Tabel 4.18. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Mengungkapkan Gagasan..	88

Tabel 4.19	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Program Pembangunan.....	89
Tabel 4.20	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan	89
Tabel 4.21	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidupnya.....	90
Tabel 4.22	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Merawat Dan Memanfaatkan Hasil Pembangunan Fisik	91
Tabel 4.23	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variable X (Partisipasi Masyarakat)	92
Tabel 4.24	Keberhasilan Pembangunan Dapat Mempengaruhi Aspek Kehidupan	94
Tabel 4.25	Keberhasilan Pembangunan Dapat Meningkatkan Hasil Pertanian Dan Perekonomian Masyarakat	95
Tabel 4.26	Keberhasilan Pembangunan Dalam Pembuatan Saluran Air Minum Yang Bersih Sehingga Kesehatan Masyarakat Dapat Terjaga ...	96
Tabel 4.27	Keberhasilan Pembangunan Dengan Tersedianya MCK Dan Sanitasi Yang Baik Dan Memadai Sehingga Masyarakat Dapat Menjaga Kebersihan Lingkungan	97
Tabel 4.28	Keberhasilan Pembangunan Dengan Menggerakkan Karang Taruna	98
Tabel 4.29	Keberhasilan Pembangunan Dapat Dilihat Dengan Dibangunnya Majelis Ta'lim.....	99
Tabel 4.30	Keberhasilan Pembangunan Dengan Mendirikan Koperasi Pedesaan	100
Tabel 4.31	Keberhasilan Pembangunan Dengan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Transparan (Terbuka).....	100
Tabel 4.32	Keberhasilan Pembangunan Dengan Terciptanya Penyelenggaraan Pembangunan Yang Baik Dan Bertanggung Jawab (Accountable).....	101
Tabel 4.33	Keberhasilan Pembangunan Dengan Terciptanya Penyelenggaraan Pembangunan Yang Baik Dan Bijaksana	102

Tabel 4.34	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variable Y (Keberhasilan Pembangunan)	103
Tabel 4.35	Pengujian Validitas Variable X (Partisipasi Masyarakat).....	105
Tabel 4.36	Pengujian Validitas Variable Y (Keberhasilan Pembangunan) ..	105
Tabel 4.37	Pengujian Reliabilitas	107
Tabel 4.38	Regresi Sederhana Partisipasi Masyarakat (X) Terhadap Keberhasilan Pembangunan Fisik (Y)	109
Tabel 4.39	Coefisien Determinasi Partisipasi Masyarakat (X) Terhadap Keberhasilan Pembangunan Fisik (Y)	110
Tabel 4.40	Hasil Uji Hipotesi.....	111

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir.....	56
Gambar 3.1. Kurve Penerimaan Dan Penolakan Hipotesis Pengaruh Positif Antara Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pembangunan Fisik.....	68
Gambar 4.1 Grafik Normalitas Data Partisipasi Masyarakat dan Keberhasilan Pembangunan Fisik.....	108
Gambar 4.2 Kurve Uji Hipotesis	112

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar pertanyaan responden
- Lampiran 2. Tabulasi Data Variabel X
- Lampiran 3. Tabulasi Data Variabel Y
- Lampiran 4. Uji Validitas Variabel X
- Lampiran 5. Uji Validitas Variabel Y
- Lampiran 6. Uji Reliabilitas variable X dan variable Y
- Lampiran 7. Uji Normalitas Data partisipasi masyarakat dan keberhasilan pembangunan fisik
- Lampiran 8. Regresi Linier Partisipasi masyarakat (X) terhadap keberhasilan pembangunan fisik
- Lampiran 9. Koefisien Determinasi
- Lampiran 10. Grafik penerimaan dan penolakan uji hipotesis
- Lampiran 11. Peta Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang
- Lampiran 12. Kartu Bimbingan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demikian kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat Otonomi Daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Kewenangan yang luas dan utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan daerah yang sehat.

Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBD. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Selanjutnya khusus untuk anggaran pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) 70% dari anggaran tersebut merupakan belanja pemberdayaan masyarakat. Ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (2) Permendagri No 37 tahun 2007 jo. Pasal 21 ayat (4) Perbup No 55 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :

1. Biaya perbaikan prasarana dan sarana publik,
2. Menunjang kegiatan LPMD dan PKK,
3. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMD,
4. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan,
5. Perbaikan lingkungan dan pemukiman,
6. Teknologi Tepat Guna,

7. Perbaikan kesehatan dan pendidikan,
8. Pengembangan sosial budaya; dan
9. Kegiatan lainnya yang dianggap penting

Hal ini lebih ditegaskan dalam pengaturan mengenai desa yaitu dengan ditetapkannya PP No 72 tahun 2005. Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu : Keanekaragaman, Partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri No 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan di desa merupakan model Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam hal perawatan maupun pemeliharaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan adanya perubahan pada masyarakat baik pola pikir, penghasilan masyarakat, pembangunan infra struktur, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga proses

pembangunan merupakan proses tawar-menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri.

Akan tetapi tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat di Desa Sukaratu masih rendah dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengendalian yang berbentuk evaluasi dan pemantauan pembangunan serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan hal ini karena kurangnya kepedulian masyarakat akan pembangunan di desa Sukaratu.

Kurang partisipasi masyarakat disebabkan karena pemerintahan yang tidak akuntabel (terbuka) sehubungan dengan program-program pembangunan yang akan dijalankan. Dalam mengambil keputusan pemerintah hanya menjalankannya sendiri tanpa melibatkan masyarakat tentang bagaimana program-program pembangunan itu dijalankan sedangkan keberhasilan pembangunan merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Apabila masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap pembangunan diharapkan keberhasilan pembangunan dapat lebih efisien. Kendala tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal masih sangat rendah yaitu :

1. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pertemuan maupun musyawarah desa mengenai program pembangunan fisik di desa Sukaratu hal ini dapat mengakibatkan kurangnya peran aktif masyarakat untuk hadir dalam setiap pertemuan atau musyawarah yang diadakan oleh aparat pemerintah desa untuk

membahas program pembangunan fisik padahal kegiatan tersebut sangat penting bagi warga dan berguna untuk kepentingan warga juga khususnya Desa Sukaratu.

2. Kurangnya pemerintah menggerakkan budaya gotong royong

Pemerintah sulit untuk melibatkan masyarakat terutama dalam menggerakkan budaya gotong royong dalam masyarakat. Padahal dengan adanya gotong royong secara tidak langsung masyarakat sudah berperan aktif dalam perawatan sarana dan prasarana pembangunan yang ada di Desa Sukaratu serta menjalin tali silaturahmi antara sesama. Keadaan ini karena tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya gotong royong bagi semakin berkurang, mereka lebih memilih berkumpul dengan keluarga bahkan hari minggu mereka gunakan untuk beristirahat, berekreasi dengan keluarga.

3. Serta sudah berkurangnya peran karang taruna di desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal. Hal ini dikarenakan banyak pemuda Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal memilih untuk bekerja sebagai buruh pabrik daripada harus tinggal dan membangun didesanya. Padahal pemuda merupakan roda penggerak pembangunan dengan partisipasi yang diberikan oleh pemuda memberikan keberhasilan pembangunan dalam berbagai aspek.

Demikian juga dengan pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah hal ini jika dibandingkan dengan Desa Cikeusal yang sudah jauh lebih maju serta dari penerimaan Dana Alokasi Desa (ADD) Desa Cikeusal jauh lebih besar dari ADD yang diterima oleh Desa Sukaratu. Desa

Cikeusal merupakan desa yang berada dekat dengan kantor Kecamatan Cikeusal sehingga lebih diperhatikan oleh pemerintah daripada Desa Sukaratu.

Pada tahun 2010 desa Sukaratu menerima Alokasi Dana Desa (ADD) berkisar 48% atau sebesar Rp. 157.520.000,- (*Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*) dari rencana kerja pembangunan desa tahun 2010 yang diajukan oleh masyarakat desa Sukaratu untuk kegiatan pembangunan desa baik untuk pembangunan perbaikan jalan, perbaikan gorong-gorong, sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan serta kesehatan maupun untuk irigasi dan pengairan pesawahan maupun air bersih untuk minum sebesar Rp. 330.000.000,- (*tiga ratus tiga puluh juta*) yang diajukan oleh masyarakat Desa Sukaratu.

Dengan demikian alokasi dana desa yang diperoleh Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang sangat kecil sehingga membuat Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang sangat sulit untuk berkembang walaupun Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang merupakan kabupaten yang lokasinya dekat dengan ibukota propinsi tetapi justru kondisi infrastruktur di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang masih kurang bahkan terbilang desa tertinggal serta belum bisa melakukan pemerataan dalam pembinaan desa-desa yang ada di dalam wilayahnya.

Adapun kondisi infrastruktur atau pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang yang perlu mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun warga sekitar dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 1.1
Keadaan Fasilitas Fisik Di Desa Sukaratu
Tahun 2013

No	Fasilitas	Kondisi			Keterangan
		Rusak	Cukup baik	Baik	
1	Jalan sepanjang 7 km	43%	57%		Sepanjang 3 km jalan mengalami kondisi kurang baik
2	20 gorong-gorong	75%	25%		15 gorong – gorong mengalami kerusakan
3	Tembok penahan tanah (TPT)	100%			Tembok penahan tanah rusak parah
4	Lembaga pendidikan				
	a. TK atau Play Group sejumlah 3	25%	75%		TK atau Play Group dalam keadaan cukup baik
	b. SD Sebanyak 4 Sekolah	25%	75%		Kondisi bangunan SD kurang terawat dan kumuh
	c. SMA sebanyak 3 sekolah	25%	75%		2 sekolah diantaranya belum memiliki bangunan sendiri
5	Irigasi				
	a. Saluran sekunder	100%			Sepanjang 0,2 km saluran irigasi sekunder dalam keadaan rusak
	b. Saluran tersier	100%			Saluran irigasi tersier dalam keadaan rusak
6	Sarana Ibadah Masjid sebanyak 4 buah	25%	75%		Sebanyak 4 buah, sarana ibadah dalam keadaan cukup baik
7	Lembaga Kesehatan	25%	75%		Bangunan fisik Puskesmas dalam keadaan cukup baik

Sumber : Desa Sukaratu 2012

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa kondisi fisik berupa jalan desa di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang sebagian besar jalan mengalami kerusakan sebesar 43% atau sepanjang 3 km dari total jalan sepanjang 7 km, dimana jalan tersebut merupakan jalan desa yang menghubungkan antara dua desa sehingga dapat mempermudah akses warga dalam beraktivitas baik untuk pelajar, pekerja maupun petani. Pada tahun 2010 masyarakat Desa Sukaratu

sudah mengajukan permohonan bantuan dana untuk pengaspalan jalan penghubung antara Kampung Pasir Menyan dengan Kampung Cihui kepada pemerintah daerah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tetapi dana yang diterima oleh Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang adalah sebesar Rp. 18.510.000 (delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan pengaspalan jalan antara Kampung Pasir Menyan dengan Kampung Cihui. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Selain itu terdapat pula beberapa fasilitas umum yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat sekitar seperti 20 gorong-gorong serta irigasi yang kondisinya sangat memprihatinkan dimana banyak gorong-gorong sering dilewati oleh kendaraan besar serta banyaknya sampah dan tanah yang menghambat jalannya laju air, sebanyak 75% gorong-gorong dalam keadaan rusak dan 25% kondisi gorong-gorong dalam keadaan cukup baik sedangkan untuk irigasi banyak sekali kondisi irigasi yang sangat memprihatinkan dimana banyak irigasi tidak diperkuat dengan membuatkan talut di sepanjang irigasi sehingga tanah yang berada di sekitar irigasi menjadi tidak longsor. Keadaan tersebut dapat mengganggu pembangunan.

Begitu juga dengan kondisi Tembok Penahan Tanah (TPT) yang terdapat di Desa Sukaratu hampir 100% dalam keadaan rusak parah hal ini dapat mengakibatkan longsor pada waktu musim penghujan, sedangkan untuk lembaga pendidikan di Desa Sukaratu terdapat 3 (tiga) jenjang pendidikan yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) dan (Play Group) sebanyak 3 unit sebanyak 75% dalam

keadaan cukup baik, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4 sekolah dalam kondisi kurang terawat, dan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3 sekolah dimana 2 (dua) diantaranya belum memiliki bangunan sendiri.

Sedangkan untuk irigasi Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang mengajukan perbaikan saluran irigasi persawahan sepanjang 0,2 KM dan saluran tersier sebesar Rp. 40.000.000,- tetapi realisasi dana yang diberikan oleh pemerintah hanya sebesar Rp. 18.000.000,- hal ini mengakibatkan sebanyak 75% irigasi dalam keadaan rusak dan membuat saluran air ke daerah persawahan terganggu sehingga tidak semua petani mendapatkan saluran air, keadaan tersebut dapat berimbas dalam hal mengurangi pendapatan petani di bidang persawahan, untuk sarana ibadah yaitu masjid sebanyak 4 buah dalam kondisi cukup baik hal ini karena pembiayaan pembuatan masjid sebagian besar hasil swadaya masyarakat sedangkan untuk lembaga kesehatan bangunan fisik Puskesmas sebanyak 75% dalam keadaan cukup baik karena pemerintah sangat memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat Desa Sukaratu dan juga atas partisipasi masyarakat dalam merawat dan menjaga kondisi bangunan dalam keadaan baik agar lebih memudahkan masyarakat yang membutuhkan tenaga kesehatan.

Sebetulnya jika dilihat dari sumber pendapatan atau penghasilan masyarakat Desa Sukaratu dalam keadaan cukup, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai buruh pabrik, Pegawai Negeri Sipil serta pedagang dan sisanya sebagai petani. Dengan melihat mata pencaharian penduduk Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal maka seharusnya pembangunan

fisik di daerah tersebut sangat bagus dan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Karena kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah khususnya aparat pemerintahan desa setempat sehingga membuat Desa Sukaratu sangat minim akan perubahan terutama pembangunan fisik yang mengakibatkan akses menuju Desa Sukaratu sulit untuk dilalui. Keadaan demikian tidak membuat aparat pemerintahan desa Sukaratu tergerak untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembangunan fisik, dan juga Sumber Daya Manusia aparat pemerintahan desa yang masih rendah, serta tidak transparannya aparat pemerintah desa dalam hal program pembangunan fisik, aparat pemerintahan desa yang tidak melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap musyawarah dan pertemuan mengenai program pembangunan fisik yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga membuat warga tidak aktif dalam program pembangunan fisik.

Dengan demikian dapat mengakibatkan pembangunan fisik di Desa Sukaratu terhambat. Hal ini terbukti setiap musyawarah yang diadakan desa sedikit sekali masyarakat yang hadir dalam mengikuti musyawarah yang diadakan desa tersebut, selain itu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan suatu program yang akan dilaksanakan khususnya pembangunan fisik aparat desa hanya mengajak orang-orang terdekat ketika akan melaksanakan program pembangunan fisik, sehingga masyarakat tidak tahu dan akhirnya masyarakat tidak ikut serta dalam pembangunan fisik yang ada di desa tersebut.

Melihat kondisi yang demikian dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagai *stakeholder* dalam proses pembangunan fisik yang sedang dijalankan yaitu kurangnya pemeriksaan (Audit) yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pengguna anggaran dalam hal ini (Dinas Pekerjaan Umum) yang menyerahkan pekerjaannya dengan pihak lain (kontraktor) akan tetapi pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagai pelaksana pembangunan.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengambil judul :
“Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pembangunan Fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang masalah, maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Banyaknya infrastruktur yang ada terbengkalai dimana hampir sepanjang jalan desa mengalami kerusakan sebanyak 43%, serta kondisi infra struktur pendidikan keagamaan dan saluran irigasi masih dalam kondisi yang kurang baik.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang sebanyak 25% sehingga pembangunan fisik terhambat.

3. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah dalam merawat sarana dan prasarana yang ada di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang
4. Akibat kesibukan warga Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal setelah bekerja sebagai petani, buruh pabrik, PNS maupun pedagang sehingga menimbulkan kurangnya motivasi untuk gotong royong, padahal partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong sangat membantu guna terlaksananya pembangunan fisik yang baik.
5. Kurangnya aparat pemerintah desa dan jajarannya dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan fisik di desa Sukaratu sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat sangat rendah.

1.3. Batasan Masalah

Suatu masalah yang akan dibahas atau diteliti apabila tidak diberikan batasan dan ruang lingkup. Dari uraian-uraian yang ada dalam latar belakang dan identifikasi masalah peneliti mempunyai keterbatasan kemampuan dan berfikir secara menyeluruh, maka dengan itu peneliti mencoba membatasi penelitiannya yang ada dalam identifikasi masalah yaitu tentang pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

1.4. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang?
2. Sejauhmana pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang?
3. Seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka peneliti dapat mengetahui tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

1.6. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang hukum, politik, social dan pada umumnya dan hukum pemerintahan daerah pada khususnya terutama mengenai

partisipasi masyarakat terhadap pembangunan fisik desa. Dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan guna memperbaiki mutu pendidikan hukum, sosial, dan politik serta untuk memperkaya teori-teorinya.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrument maupun bahan kritikan serta masukan bagi pihak yang berwenang dalam hal peran partisipasi masyarakat terhadap pembangunan fisik desa agar lebih ketat dalam pengawasan dan pelaksanaan, mengingat kepala desa sebagai kepala pemerintahan yang terbawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

1.7. Sistematika Penulisan

Pada penulisan ini dibagi ke dalam lima bagian yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bagian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian kemudian indentifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis serta sistematika penulisan.

Bab II : Deskripsi teori

Pada bab ini terdiri dari deskripsi teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Deskripsi teori memaparkan pendapat para ahli tentang teori yang berkaitan dengan teori partisipasi masyarakat dan pembangunan fisik di desa. Selanjutnya kerangka berpikir menggambarkan tentang alur pemikiran peneliti dalam

penelitian ini, yang kemudian coba disimpulkan oleh peneliti sebagai jawaban sementara tentang penelitian tersebut dalam hipotesis penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini, penulis menggambarkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian instrument penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengolahan dan analisis data serta lokasi dan jadwal penelitian.

Bab IV : Hasil Pembahasan

Pada bab ini, Penulis menguraikan tentang hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi obyek penelitian, deskripsi data, kemudian dilakukan pengujian hipotesis dan ditafsirkan data tersebut dalam bentuk interpretasi hasil penelitian, serta dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang hasil penelitian ini. Deskripsi obyek penelitian memaparkan tentang obyek penelitian yang meliputi jenis kelamin responden, usia responden, tingkat pendidikan responden, serta mata pencaharian responden.

Sementara deskripsi data menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan. Kemudian dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan teknik analisis statistik yang sudah ditentukan. Hasil perhitungan selengkapnya ditempatkan dalam lampiran. Kemudian dilakukan penafsiran terhadap hasil akhir pengujian hipotesis. Setelah itu dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data.

Bab V : Penutup

Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran yang menyimpulkan hasil penelitian secara singkat, jelas serta sesuai dengan permasalahan dan hipotesis. Serta saran yang berisi masukan dari peneliti terhadap bidang yang di teliti baik secara teoritis dan praktis.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1.. Kajian Pustaka

2.1.1. Partisipasi Masyarakat

2.1.1.1. Pengertian Partisipasi

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. (Totok Mardikanto & Poerwoko Subianto, 2013:81)

Bornby (1974) dalam Totok Mardikanto & Poerwoko Subianto, (2013:81) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian:” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan-kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Menurut Julius Bobo (2003:114) mengatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan dan keterlibatan dalam memelihara suatu proses keberlangsungan suatu tatanan. Dalam konteks ini, partisipasi mengandung kewajiban dan tanggungjawab untuk menjaga, menyelamatkan dan meningkatkan kualitas keberlangsungan itu.

Oleh karena itu partisipasi menuntut kematangan dan kedewasaan para pelakunya agar tujuan yang tersurat dan tersirat di dalam keberlangsungan itu dapat dicapai dengan baik. Tanpa kematangan dan kedewasaan pelaku partisipasi, dikhawatirkan justru dapat menghambat kalau tidak merusak keberlangsungan yang dimaksudkan.

Sedangkan partisipasi menurut Theodorson dalam Azis mengemukakan bahwa : “Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu.” (<http://turindraatp.blogspot.com>)

Dewasa ini partisipasi sering dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan. Istilah partisipasi tersebut akan lebih jelas maknanya apabila secara langsung dikaitkan dengan gerak pembangunan itu sendiri. Dari uraian di atas jelas sudah bahwa partisipasi dan pembangunan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dari kaitan itu maka akan menumbuhkan kesadaran masyarakat daerah agar mereka tergerak untuk mengadakan perubahan secara aktif dan menuju kearah yang lebih baik.

Arnstein (1969) menjelaskan partisipasi sebagai arti di mana warga negara dapat mempengaruhi perubahan sosial penting, yang dapat membuat mereka berbagi manfaat dari masyarakat atas. Dia mencirikan delapan anak tangga yang meliputi: manipulasi, terapi, memberi tahu, konsultasi, penentrangan, kerjasama, pelimpahan kekuasaan, dan kontrol warga negara.

Mikkelsen (2003:64) misalnya menginventarisasi adanya enam tafsiran yang berbeda tentang partisipasi yaitu:

- a) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- b) Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- c) Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengadung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk menggunakan hal itu;
- d) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak social;

Memperhatikan beberapa pengertian partisipasi dan cara untuk mewujudkannya seperti yang sudah diuraikan tadi, tampak bahwa kriteria utama yang digunakan untuk menentukan adanya partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan tanpa harus mempersoalkan faktor yang melatarbelakangi dan mendorong keterlibatan tersebut. Dengan demikian, apabila latar belakang yang mendorong keterlibatan dimasukkan sebagai kriteria, maka variasi pengertian partisipasi tadi akan lebih mengerucut.

Dengan menggunakan kedua kriteria tersebut partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh determinasi dan kesadarannya tentang arti keterlibatannya tersebut. Apabila yang muncul hanya unsur keterlibatan dan tidak didorong oleh determinasi dan kesadaran, hal tersebut tidak masuk dalam kategori partisipasi melainkan lebih tepat disebut sebagai mobilisasi.

Partisipasi berarti menciptakan kebersamaan, melindungi untuk mencegah terjadinya persaingan yang seimbang. Dengan memahami pembangunan sebagai perubahan structural, upaya peningkatan kemampuan masyarakat, penguasaan teknologi dan mengikuti arus perkembangan zaman muncul dari dalam diri sendiri, yakni dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

2.1.1.2. Pengertian Masyarakat

Kata “Masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu Syiek, artinya “bergaul”. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk – bentuk akhiran hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai pribadi melainkan

oleh unsur – unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang sama. (Edi Suharto, 2010:47)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. (Abdullah, 2003: 319)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan memiliki suatu kebudayaan dan adat istiadat tertentu serta terikat oleh suatu aturan yang berlaku.

Sedangkan Selo Sumarjan (2005:54) mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Mengingat banyaknya definisi masyarakat, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa masyarakat adalah:

- 1) Manusia yang hidup bersama.
- 2) Bercampur untuk waktu yang lama.
- 3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- 4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menurut (Edi Suharto, 2010:47) ada beberapa fungsi masyarakat adalah :

1. Penyedia dan pendistribusi barang-barang dan jasa

2. Lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan
3. Keamanan publik
4. Sosialisasi
5. Wadah dukungan bersama atau gotong royong
6. Kontrol sosial
7. Organisasi dan partisipasi publik

2.1.1.3. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dan kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, (Totok Mardikanto, Poerwoko Subianto, 2013:82)

Artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya..

Sedangkan menurut Conyers (1991) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal
- 2) Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- 3) Mendorong adanya partisipasi umum di banyak Negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.
(<http://turindraatp.blogspot.com>)

Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Menurut Marisa B. Guaraldo Chougil dalam ,(Totok Mardikanto, Poerwoko Subianto, 2013:85) tangga partisipasi masyarakat di negara-negara yang kurang berkembang (*underdeveloped*), dapat dibagi menjadi 8 tingkatan yaitu : Pemberdayaan (*Empowerment*), Kemitraan (*Partnership*), Mendamaikan (*Conciliation*) Dissimulasi / Pura-pura (*Dissimulation*), Diplomasi (*Diplomation*), Memberikan Informasi (*Informing*), Konspirasi (*Conspiration*), Management Diri Sendiri (*Self Management*).

2.1.2. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat

Menurut Dusseldorp (1981) dalam Totok Mardikanto, Poerwoko Subianto (2013:84) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- d. Menggerakkan sumber daya masyarakat.
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- f. Memanfaatkan hasil-hal yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Adapun jenis-jenis partisipasi meliputi ,(Totok Mardikanto, Poerwoko Subianto, 2013:82):

- a. Pikiran; merupakan jenis partisipasi pada level pertama dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- b. Tenaga; merupakan jenis partisipasi pada level kedua dimana partisipasi tersebut denganmendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan
- c. Pikiran dan tenaga; merupakan jenis partisipasi pada level ketiga dimana tingkat partisipasi tersebut dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama. Biasanya konteks partisipasi tersebut berada pada suatu lembaga atau partai
- d. Keahlian; merupakan jenis partisipasi pada level keempat dimana dalam hal tersebut keahlian menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan.
- e. Barang; merupakan jenis partisipasi pada level kelima dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.
- f. Uang. merupakan jenis partisipasi pada level keenam dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang pada kalangan atas

2.1.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Menurut Totok Mardikanto (2013 : 82) partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri dari :

1) Partisipasi dalam Pengambilan keputusan.

Setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya local dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu partisipasi masyarakat dalam dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau tingkat lokal .

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam proses rencana pembangunan, biasanya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bertujuan untuk memilih alternatif dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan.

2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan.

Berhasilnya suatu program pembangunan tergantung dari keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi seluruh . Koentjaraningrat, menyatakan

bahwa partisipasi rakyat, terutama rakyat pedesaan dalam pembangunan sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda yaitu :

- a. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek pembangunan yang khusus. Dalam tipe yang pertama, rakyat pedesaan diajak, diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya fisik. Kalau rakyat ikut serta berdasarkan atas keyakinannya bahwa proyek itu akan bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas , tanpa mengharapkan upah yang tinggi. Sebaliknya, kalau mereka hanya diperintah dan dipaksa oleh atasan untuk menyumbangkan tenaga atau harta bendanya kepada proyek tadi , maka mereka tidak akan turut berpartisipasi dengan semangat tadi. Contoh. Partisipasi orang desa dalam pembangunan jalan, membuat saluran irigasi.
- b. Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan. Dalam tipe partisipasi ini tidak ada proyek aktivitas bersama yang khusus, tapi masih termasuk proyek pembangunan, tidak bersifat fisik dan tidak memerlukan perintah atau paksaan dari atasannya, tetapi berdasarkan kemauan mereka sendiri. Contoh partisipasi dalam kegiatan KB.

3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

Menurut Cohen dan Uphoff dalam (Didi Prayitno, 2008:21), membedakan tiga jenis evaluasi :

- a. *Project Contered Evaluation*, bila evaluasi ini dipandang sebagai proses evaluasi formal
- b. *Political Activities* berkaitan dengan pemilikan anggota-anggota parlemen rakyat setempat atau pemimpin setempat.

c. *Public Opinion Efforts*, opini publik dalam mengevaluasi suatu program tidak secara langsung, melainkan mempengaruhi melalui mass media/surat kabar. Misal : melalui surat pembaca dalam mengungkapkan beberapa gagasan.

4) Partisipasi dalam menerima hasil atau manfaat Pembangunan

Menurut Cohen dan Uphoff (Didi Prayitno, 2008:21) banyak cara untuk mengklarifikasikan dan menganalisis manfaat-manfaat dari hasil pembangunan. Dari segi distribusi dapat dilihat pada jumlah maupun kualitas manfaat. Dari segi lain dapat dibedakan antara *material benefit* dan *social benefits*.

- a. *Material benefits* dalam menganalisa akan berhubungan dengan konsumsi atau pendapatan , kekayaan, sedangkan
- b. *social benefits* seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, jalan-jalan, fasilitas transportasi.

2.1.4. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet (1993:97,137-143), faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri. Secara teoritis, tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh:

- a. *Jenis Kelamin*. Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem

pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban anatar pria dan wanita. Menurut Soedarno et.al (1992) dalam Yulianti (2000:34), bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya, kelompok pria akan lebih banyak berpartisipasi.

- b. **Usia.** Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan, Soedarno et.al (1992) dalam Yulianti (2000:34). Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi (Slamet, 1994:142). Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dalam hal menetapkan keputusan.
- c. **Tingkat Pendidikan.** Demikian pula halnya dengan tingkat pengetahuan. Litwin (1986) dalam Yulianti (2000:34) mengatakan bahwa, salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang

pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi.

- d. ***Tingkat Penghasilan.*** Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Menurut Barros (1993) dalam Yulianti (2000:34), bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam Panudju,1999:77-78)
- e. ***Mata Pencarian.*** Hal ini berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencarian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya. Sementara itu faktor-faktor eksternal dapat dikatakan sebagai petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program (Sunarti dalam

Suciati 2007:39). Adapun faktor-faktor eksternal dalam penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) adalah pemerintah dan swasta (LSM).

2.1.5. Pengertian Pembangunan

Pengertian pembangunan menurut Zulkarnamen Nasution (2009 : 82) yaitu modernisasi, perubahan sosial, industrialisasi, *westernisasi*, pertumbuhan (*growth*), dan evolusi sosio-kultural.

Siagian (2012:52) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. (<http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/>, Diakses tanggal 13 September 2013)

Menurut Nasution (2004 : 82) mengartikan pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bersifat partisipatori secara luas untuk memajukan keadaan social dan kebendaan bagi mayoritas masyarakat melalui perolehan mereka akan kontrol yang belih besar terhadap lingkungannya.

Rahardjo (2010:196) mengemukakan pembangunan adalah merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan. Lebih lengkap lagi, pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah yang dikehendaki.

Arjomand (2004 : 82) berpendapat bahwa sebagai suatu konsep, pembangunan menunjukkan bias evolusioner. Pendapat lainnya disampaikan oleh Lange pembangunan itu ibarat jerafah. Mencolok akan tetapi sukar digambarkan.

Seers (Nasution, 2004 : 82) mengatakan pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di Negara-negara sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat buta huruf yang rendah, pengangguran dan ketidakadilan sosial.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan adalah suatu kegiatan yang disengaja dan direncanakan bertujuan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat untuk memperbaiki kehidupan secara sadar dan berencana telah akan berlangsung. Kata lain pembangunan merupakan tindakan atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk melakukan perubahan-perubahan yang mendasar terhadap sikap, mental, struktur, sosial dan lembaga masyarakat yang dituntut untuk melakukan atau memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan sektor lainnya.

Pembangunan, merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mendirikan suatu gedung atau rumah. Itu benar jika pengertiannya dipersempit hanya kepada kegiatan atau proyek yang berkaitan dengan pembangunan gedung atau rumah. Sesungguhnya pengertian pembangunan tidaklah sebatas mendirikan gedung atau rumah. Karena Pembangunan memiliki pengertian yang sangat luas, serta bergantung kepada kondisi atau konteks yang berlaku. Negara memiliki tanggung jawab, dalam hal ini pemerintahan yang menjalankan tugas negara tersebut. Sangat banyak sektor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan.

Sektor-sektor yang menjadi tanggung jawab pemerintahan terdiri dari dua bagian penting yaitu

1. Pembangunan fisik

Pembangunan fisik dapat dilihat dengan jelas hasilnya tetapi hanya memiliki efek jangka pendek

2. Pembangunan non-fisik. Pembangunan non-fisik yang hasilnya tidak terlihat secara langsung, tetapi memiliki efek jangka panjang bagi hasilnya.

Dalam Pembangunan fisik, pemerintah berkewajiban membangun seluruh infrastruktur yang diperlukan masyarakat, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya yang berguna bagi masyarakat. Keadaan ini telah berlangsung dengan baik di Negara kita, tetapi tidak seimbang, hal ini dikarenakan perbedaan yang mencolok antara kawasan perkotaan dengan daerah, dimana kawasan daerah lebih lambat atau kurang diperhatikan dalam proyek pembangunan.

Sedangkan untuk pembangunan non-fisik, pemerintah lebih memperhatikan taraf kehidupan masyarakat didalam konteks sosial dan budaya. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kata sosial dan budaya, dimana masyarakat kita terkenal dengan budaya kolektif atau gotong royong antar warga. Kehidupan sosial di negeri ini berjalan dengan baik, dan telah diakui oleh pihak luar termasuk keanekaragaman budaya yang ada didalamnya.

2.1.6. Pembangunan Infrastruktur dan Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur

2.1.6.1. Pengertian Pembangunan Infrastruktur

Stone dalam Kodoatie (2003:53) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam Kodoatie, 2003:25).

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

The World Bank (1994:126) membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jtelekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaannya diatur pemerintah, yaitu: infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi.

Penggolongan infrastruktur tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah. Pengertian diatur tidak sama dengan dibangun oleh pemerintah, karena penyediaan infrastruktur tersebut dapat dikerjasamakan pembangunan dengan badan usaha, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dijelaskan beberapa jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha mencakup :

1. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
2. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
3. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
4. Infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
5. Infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
6. Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
7. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan

8. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi. (Kodoatie, 2003:35)

Pembedaan antara infrastruktur dasar dan lainnya tidaklah selalu sama dan dapat berubah menurut waktu. Misalnya telepon yang dulunya digolongkan sebagai infrastruktur pelengkap, sekarang digolongkan sebagai infrastruktur dasar.

Pembangunan infrastruktur adalah sebagai sebuah pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada rakyat sebagai unsur pembangunan nasional, dana infrastruktur bisa diperoleh:

1. Dana Masyarakat yaitu dari pajak.
2. Pinjaman luar negeri dengan bunga yang telah disepakati.
3. Sumber-sumber dana yang lain.

Pemerintah Pusat sendiri telah mengalokasikan APBN di bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu bahwa: *“Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program”*.

Namun jika Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai pembangunan jalan secara keseluruhan maka Pemerintah Pusat akan membantu, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) dan (3) PP No. 34 Tahun 2006 yang menyebutkan :

(2) “Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri”.

Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, maka Pemerintah Pusat memberikan bantuan pembiayaan yang diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Infrastruktur ataupun Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur.

Menurut Herman Abdullah (2009:284) Dalam pembangunan infrastruktur ini tantangan yang dihadapi di satu sisi terletak pada bagaimana infrastruktur membantu pengurangan kemiskinan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat ketersediaan pelayanan umum, kemampuan dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan terjangkau terkendala atau keterbatasan anggaran tentu menjadi tugas pemerintah untuk memenuhinya melalui berbagai strategi dan kebijakan, termasuk kebijakan perkembangan infrastruktur dalam kerangka desentralisasi, dekosentrasi dan otonomi daerah.

Pembangunan Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital

guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan adalah:

1. **Dapat diterima (*Acceptable*)**, pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah desa sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara luas (*acceptable*). Prinsip ini berlaku dari sejak pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur, penentuan spesifikasi teknis, penentuan mekanisme pengadaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk pada penetapan mekanisme pemanfaatan dan pemeliharaannya.
2. **Transparansi**, penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparent*). Transparansi antara lain dilakukan melalui penyebaran informasi terkait program secara akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
3. **Akuntabel**, penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, dan mutu pekerjaan.
4. **Berkelanjutan**, penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*) yang ditandai dengan adanya rencana pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur terbangun secara mandiri oleh masyarakat. Herman Abdullah (2009:284)

Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal (Biemo W. Soemardi dan Reini D. Wirahadikusumah : 2009)

2.1.6.2. Indikator Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) 2008 merupakan bagian dari PNPM, dialokasikan untuk 2.060 desa di 176 kabupaten/kota di 26 Provinsi di Indonesia. Seluruh desa tersebut ialah usulan dari masyarakat dan pemerintah yang belum mendapatkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi

Bahan Bakar Minyak. Program ini menekankan partisipasi masyarakat dalam proses kegiatannya. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 2008, dititikberatkan penanganannya pada desa tertinggal yang memiliki pelayanan infrastruktur yang rendah.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal yang harus dipikirkan adalah kita harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi satu sama lainnya. Karena ini merupakan sebuah kemampuan sebuah bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Sering kali kita melihat jalan rusak, gedung tidak terurus, jembatan yang rusak, akses jalan ke tol macet total. Ini adalah gambaran yang sangat buruk dan tidak bisa terus-menerus terjadi.

[\(http://septosuhanda.wordpress.com/2012/08/22/indonesia-dan-pembangunan -
dibidang-infrastruktur-septo-indarto-team-double-s/\)](http://septosuhanda.wordpress.com/2012/08/22/indonesia-dan-pembangunan-dibidang-infrastruktur-septo-indarto-team-double-s/)

Salah satu tujuan kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahannya dan penyediaan infrastruktur pedesaan.

Sedangkan keberhasilan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) adalah :

1. Tersedianya infrastruktur pedesaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatnya kemampuan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur pedesaan; dan
3. Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pedesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. (Rustiningsih, 2002 : 23)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keberhasilan pembangunan infrastruktur pada nomor satu dimana infrastruktur yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat memerlukan tingkat partisipasi masyarakat dalam penentuan jenis infrastruktur yang akan dibangun. Untuk mencapai sasaran nomor dua dimana kegiatan tersebut dilakukan demi meningkatnya kemampuan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur, maka diperlukan partisipasi masyarakat yang tinggi untuk dapat mewujudkannya kondisi kemampuan masyarakat yang diharapkan. Sedangkan sasaran ketiga, sangat jelas mencantumkan bahwa partisipasi merupakan sasaran utama.

Sedangkan menurut Herman Abdullah (2009:283) yang termasuk indikator keberhasilan pembangunan mencakup peningkatan partisipasi masyarakat, keterbukaan akses informasi, berkurangnya konflik sosial, semakin mudahnya administrasi, berkurangnya diskriminasi, terbangunnya kapasitas sistemis pemerintahan, keberadaan lembaga-lembaga publik yang peduli pada masyarakat miskin, serta kerangka kerja kelembagaan yang jelas.

Menurut Roestanto (2004 : 25), pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa selain akan membantu percepatan pembangunan desa, juga akan membantu pemerintah mengawal proses pembangunan karena masyarakat di desa akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Roestanto menjelaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan jalan, titian, jembatan desa, drainase, tambatan perahu, irigasi

perdesaan, air minum dan sanitasi perdesaan, maka pemerintah melaksanakannya dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, yaitu menyelenggarakan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP).

Kinerja pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Masyarakat dilokasi sasaran mempunyai akses yang lebih mudah kepusat kegiatan perekonomian, dan atau mempunyai akses yang lebih mudah untuk memperoleh air irigasi guna meningkatkan produksi pertanian dan atau mempunyai akses yang lebih mudah dan atau lebih murah untuk mendapatkan air minum dan memiliki akses sanitasi yang memadai;
2. Terbentuknya lembaga pelaksanaan program Organisasi Masyarakat Swakarsa (OMS) yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Infrastruktur Pedesaan ;
3. Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur terbangun. (Kodoatie, 2003 :67)

2.1.6.3. Pembangunan Pedesaan

Program Pembangunan Pedesaan merupakan salah satu usaha Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan yang dewasa ini meliputi lebih kurang 80% dari penduduk Indonesia.

Tujuan pembangunan pedesaan adalah untuk meletakkan landasan yang kokoh kuat bagi masyarakat pedesaan untuk berkembang atas kekuatan dan kemampuan sendiri di dalam melaksanakan pembangunan desanya, sedangkan peranan Pemerintah dalam hal ini hanyalah memberikan bantuan, pengarahan, bimbingan dan pengendalian yang dapat meningkatkan usaha swadaya gotong-royong masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang dari

desa swadaya menjadi desa swakarya dan desa swasembada.
(www.bappenas.go.id/)

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran pembangunan Pedesaan dalam jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan sektor-sektor yang menjadi prioritas desa untuk meningkatkan produksi, perluasan lapangan kerja, pemerataan dan penyebaran penduduk, pengembangan koperasi, keluarga berencana, pendidikan dan kesehatan. Sasaran pembangunan pedesaan dalam jangka panjang adalah untuk meletakkan landasan pembangunan nasional yang sehat dan kuat agar desa-desa mampu melaksanakan pembangunan desanya sendiri secara swadaya dan gotong-royong.

Seluruh kegiatan pembangunan itu dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keserasian antara perkembangan pedesaan dan perkotaan didalam rangka pembangunan regional dan nasional. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, Pemerintah telah mendorong pembangunan pedesaan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut :

- a. Memberikan Bantuan Pembangunan Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia dengan mendorong dan menggerakkan potensi swadaya gotong-royong masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan desanya.
- b. Membangun dan membina Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) sebagai suatu wadah dan sistem perencanaan dan pelaksana.
(www.bappenas.go.id/)

Guna lebih menjamin berhasilnya program kegiatan tersebut, dalam rangka

mencapai keselarasan antara tujuan pembangunan nasional dan daerah, memanfaatkan potensi daerah serta sekaligus memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh daerah, maka bantuan tersebut dibagi atas dua bagian, yaitu :

- 1). Dana bantuan yang ditetapkan dipergunakan untuk membiayai penunjang jalan dan jembatan, peningkatan dan penyempurnaan irigasi serta biaya eksploitasi dan pemeliharaan pengairan;
- 2) Dana bantuan yang diarahkan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun proyek-proyek yang bersifat ekonomis produktif, pengembangan daerah minus, pembangunan perkotaan, peningkatan aparatur pemerintah, pembinaan generasi muda, pembinaan golongan ekonomi lemah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan. (www.bappenas.go.id/)

Seluruh bantuan pembangunan desa tersebut telah menghasilkan berbagai prasarana dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, sesuai dengan kondisi dan masalah desa yang bersangkutan. Bantuan desa juga telah mendorong berkembangnya swadaya masyarakat, khususnya yang berwujud sumbangan masyarakat, yang secara langsung dapat membantu memperbesar hasil dan memperluas jangkauannya.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari bantuan-bantuan pembangunan desa bersama swadaya masyarakat tersebut telah berhasil membantu meningkatkan kemandirian penduduk pedesaan, meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dan makin meluaskan cakupan serta sebaran kegiatan-kegiatan pembangunan sampai ke pelosok-pelosok tanah air. (www.bappenas.go.id/)

Berbagai dampak program pembangunan pedesaan telah dapat terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah desa Swasembada. Hal ini menunjukkan

bahwa kesadaran pemahaman masyarakat pedesaan dalam kemandirian dan peran sertanya dalam proses pembangunan semakin meningkat. Kesiapan partisipasi dalam perekonomian daerah juga semakin mantap. Di samping itu dampak pembinaan desa Swasembada diharapkan akan dapat memperkokoh perekonomian koperasi yang berlandaskan pada kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan. Di samping itu derajat kesehatan dan keadaan gizi masyarakat semakin membaik. Berbagai pencapaian tingkat kesejahteraan nasional, antara lain didukung pula oleh kinerja program ini.

Masyarakat desa memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan potensi diri dan keluarganya, serta membangun sarana dan prasarana di desa. Namun demikian, tanpa perhatian dan bantuan serta stimulan dari pihak-pihak luar daerah dan pemerintah proses pembangunan di daerah berjalan dalam kecepatan yang relatif rendah. Kondisi ini yang menyebabkan pembangunan di daerah terkesan lamban dan cenderung terbelakang.

Menurut Ali Hanapiah Muhi (2011:2) Pada masa orde baru secara substansial pembangunan daerah cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan daerah lebih bersifat *top-down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunan daerah lebih cenderung diserahkan kepada daerah itu sendiri. Sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Program pembangunan daerah lebih bersifat *bottom-up* atau kombinasi *bottom-up* dan *top-down*.

Top-down Planning. Perencanaan pembangunan yang lebih merupakan inisiatif pemerintah (pusat atau daerah). Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh

pemerintah atau dapat melibatkan masyarakat daerah di dalamnya. Namun demikian, orientasi pembangunan tersebut tetap untuk masyarakat daerah.

Bottom-up Planning. Perencanaan pembangunan dengan menggali potensi riil keinginan atau kebutuhan masyarakat daerah. Dimana masyarakat daerah diberi kesempatan dan keleluasan untuk membuat perencanaan pembangunan atau merencanakan sendiri apa yang mereka butuhkan. Masyarakat daerah dianggap lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Pemerintah memfasilitasi dan mendorong agar masyarakat daerah dapat memberikan partisipasi aktifnya dalam pembangunan daerah.

Salah satu keterbelakangan yang dialami daerah pedesaan di Indonesia dapat dilihat dari aspek pembangunan sarana dan prasarana. Menurut Ali Hanapiah Muhi (2011:13) Beberapa sarana dan prasarana pokok dan penting di daerah pedesaan, antara lain :

a. ***Prasarana dan sarana transportasi***

Salah satu prasarana dan sarana pokok dan penting untuk membuka isolasi daerah pedesaan dengan daerah lainnya adalah prasarana transportasi (seperti jalan raya, jembatan, prasarana transportasi laut, danau, sungai dan udara), dan sarana transportasi (seperti mobil, sepeda motor, kapal laut, perahu mesin, pesawat udara dan sebagainya). Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi yang memadai akan mendukung arus orang dan barang yang keluar dan masuk ke daerah pedesaan. Untuk mendorong peningkatan dinamika masyarakat daerah pedesaan akan arus transportasi orang dan barang

keluar dan masuk dari dan ke daerah pedesaan, diperlukan prasarana dan sarana transportasi yang memadai.

Salah satu penyebab daerah pedesaan masih terisolasi atau tertinggal adalah masih minimnya prasarana dan sarana transportasi yang membuka akses daerah pedesaan dengan daerah lainnya. Kondisi prasarana dan sarana transportasi yang minim berkontribusi terhadap keterbelakangan ekonomi daerah pedesaan. Secara umum, masyarakat daerah pedesaan menghasilkan jenis produk yang relatif sama, sehingga transaksi jual beli barang atau produk antar sesama penduduk di suatu daerah relatif kecil.

Dalam kondisi prasarana dan sarana transportasi yang minim, produk yang dihasilkan masyarakat daerah pedesaan sulit untuk diangkut dan dipasarkan ke daerah lain. Jika dalam kondisi seperti itu, masyarakat daerah pedesaan menghasilkan produk pertanian dan non pertanian dalam skala besar, maka produk tersebut tidak dapat diangkut dan dipasarkan ke luar daerah dan akan menumpuk di daerah. Penumpukan dalam waktu yang lama akan menimbulkan kerusakan dan kerugian. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi warga masyarakat di daerah pedesaan. Sebaliknya, hal tersebut akan mendorong sebagian warga masyarakat di daerah pedesaan untuk merantau atau berpindah ke daerah lain terutama daerah perkotaan yang dianggap lebih menawarkan masa depan yang lebih baik.

b. ***Prasarana dan sarana pendidikan yang kurang memadai***

Sebagian dari masyarakat di daerah pedesaan telah memiliki kesadaran untuk mendidik anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Keadaan prasarana pendidikan seperti lembaga pendidikan dan gedung sekolah di daerah pedesaan relatif terbatas. Ketersediaan prasarana pendidikan di daerah pedesaan yang masih kurang memadai dapat terlihat dari terbatasnya jumlah lembaga pendidikan serta kondisi fisik bangunan sekolah yang kurang representatif (rusak, tidak terawat dengan baik, kekurangan jumlah ruang kelas dan sebagainya). Selain itu, sarana pendidikan di daerah pedesaan juga sangat terbatas seperti kurangnya ketersediaan buku-buku ajar, kondisi kursi dan meja belajar yang seadanya, tidak tersedianya sarana belajar elektronik, tidak tersedianya alat peraga dan sebagainya. Keterbatasan prasarana dan sarana pendidikan di daerah pedesaan mendorong sebagian masyarakat daerah pedesaan untuk menyekolahkan anak-anaknya ke luar daerah terutama ke daerah perkotaan. Hal ini turut mendorong laju migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan.

c. *Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan*

Indonesia sebagai negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilannya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian sebagai mata pencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan. Sampai saat ini lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor usaha bidang pertanian. Kegiatan usaha ekonomi produktif di daerah pedesaan masih sangat terbatas ragam dan jumlahnya, yang cenderung terpaku pada bidang pertanian (agribisnis). Aktivitas usaha dan mata pencaharian utama masyarakat di daerah pedesaan

adalah usaha pengelolaan/ pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan pertanian. Bukan berarti bahwa lapangan kerja di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas. Peluang usaha di sektor non-pertanian belum mendapat sentuhan yang memadai dan belum berkembang dengan baik. Kondisi ini mendorong sebagian penduduk di daerah pedesaan untuk mencari usaha lain di luar daerahnya, sehingga mendorong mereka untuk berhijrah/migrasi dari daerah pedesaan menuju daerah lain terutama daerah perkotaan. Daerah perkotaan dianggap memiliki lebih banyak pilihan dan peluang untuk bekerja dan berusaha.

2.2. Kerangka Berpikir

Menyeruaknya arus reformasi mendorong perubahan di berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam sistem birokrasi di Indonesia. Kebijakan pemerintah menerapkan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dengan memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri merupakan langkah awal dalam menghilangkan kelemahan pemerintahan sentralistik pada masa yang lalu. Dengan desentralisasi diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan dapat lebih ditingkatkan.

Dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah ini menitikberatkan pada kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta

masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan di daerahnya dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem social dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa (Rochajat Harun, 2011:3). Pembangunan sebagai suatu proses perubahan social dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat untuk kemajuan social dan materil (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan, dan kualitas lainnya yang dihargai) bagi mayoritas rakyat melalui control yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Pembangunan juga sebagai proses perubahan social yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan alam dan kultural tempat mereka berada dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini dan menjadikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri juga dapat memanfaatkan hasil-hasil pembangunannya oleh mereka sendiri.

Dalam pandangan para ahli pembangunan, wilayah pedesaan dianggap mampu apabila ; sarana dan prasarana dasar tersedia dan masyarakatnya memiliki kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupan mereka, baik fisik maupun sosial-psikologis. Masyarakatnya secara umum memiliki tingkat

pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti pangan, kesehatan dan gizi, pendidikan, perumahan dan lingkungan hidup atau dengan kata lain kuat dari segi ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan dan politik.

Di dalam proses pengembangan desa terdapat dua unsur pokok, yaitu pihak yang mengembangkan dan yang dikembangkan. Sebagai sebuah proses perubahan sosial, pembangunan desa identik dengan pembangunan masyarakat (*community development*) serta pembangunan sarana dan prasarana dasar. Dalam konteks ini, masyarakat hendaknya dipahami sebagai setiap orang yang berada di luar sektor publik atau pemerintah yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam menciptakan kekuatan ekonomi di pedesaan.

Pembangunan saat ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan sentralistik, kalau dulu daerah ditempatkan sebagai obyek yang pasif, saat ini wilayah desa dan kecamatan terutama rakyat yang menempati posisi pasif. Pendekatan dan praktek-praktek pembangunan seperti ini sesungguhnya jauh dari tujuan dan sasaran pelaksanaan destoda dan pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang semu, tidak bertumpu kepada pertumbuhan produktifitas nyata. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya fenomena dan realitas sosial yang tidak paralel dan serba kontradiksi dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu cara atau pendekatan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam membangun wilayah pedesaan adalah dengan melibatkan seluruh *stakeholder* untuk meningkatkan status ekonomi rakyat secara berkelanjutan, mengingat kemampuan pemerintah daerah yang sangat terbatas. Perhatian

hendaknya dipusatkan pada perbaikan ekonomi rakyat, karena akan dapat mempengaruhi perbaikan kondisi kesejahteraan sosial secara umum. Kondisi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan sangat membutuhkan kebijaksanaan pembangunan yang didasari oleh determinisme ekonomi antara lain indikatornya adalah peningkatan pendapatan perkapita. Untuk melakukan usaha perbaikan ekonomi masyarakat, peran pemimpin dalam pemerintahan otonomi akan sangat menentukan. Pemerintah daerah harus memiliki rencana dan program yang jelas berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan status sosial masyarakat pedesaan.

Keberhasilan pemerintah daerah di masa yang akan datang, hendaknya diukur dengan indikator-indikator sosial ekonomi yang lebih masuk akal dan nyata, misalnya tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan status kesehatan serta ketersediaan fasilitas pelayanan umum seperti ; air bersih, listrik, sarana telekomunikasi dan transportasi. Indikator tersebut tidak hanya diukur pada wilayah perkotaan, tetapi juga sangat penting pada wilayah pedesaan. Tanpa indikator yang jelas dan terukur, birokrasi era otonomi akan tidak jelas dalam menetapkan pola dan program pembangunannya, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik.

Dengan adanya indikator sebagaimana disebutkan di atas, maka target untuk setiap pemerintah daerah akan dapat ditetapkan. Dalam kaitan ini, kinerja eksekutif dan legislatif yang ada di daerah juga hendaknya diukur dengan menggunakan indikator yang lebih nyata, karena kewenangan yang mereka miliki sangat menentukan nasib rakyat. Ketika persoalan ekonomi masyarakat belum

tertangani secara baik, maka kinerja pemerintah daerah perlu dipertanyakan, terutama bagi yang berwenang dalam pengambilan kebijakan.

Suatu pembangunan akan berhasil jika masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena pembangunan merupakan suatu yang mengarah pada perubahan maka Bloom dan Fischer dalam Adimihardja (2004) mengemukakan bahwa ada beberapa hak masyarakat untuk mengetahui dan terlibat dalam setiap aspek perubahan, yaitu :

- a. Berhak mengetahui masalah apa yang ada (dari perspektif praktisi) dalam bahasa yang jelas dan dapat dimengerti.
- b. Berhak berpartisipasi dalam memilih tujuan dan sasaran.
- c. Berhak mengetahui apa yang akan terjadi selama proses intervensi, siapa yang melakukan, siapa melakukan untuk siapa dan dibawah kondisi apa ?
- d. Berhak mengetahui berapa lama kegiatan paling lama dilakukan.
- e. Berhak mengetahui metode-metode alternatif dalam membahas permasalahan dan kemungkinan-kemungkinannya dalam memecahkan kesulitan yang terjadi.
- f. Berhak mengetahui seberapa besar kegiatan itu dapat membebani dan mengetahui nilai pelayanan yang tersedia.
- g. Berhak mengetahui catatan-catatan yang disimpan dan siapa yang boleh melihatnya.
- h. Berhak mengetahui lebih dahulu terminasi pelayanan.
- i. Berhak mengambil kendali atas kehidupan dan semampunya.
- j. Berhak menjadi bagian dari dan diinformasikan tentang evaluasi mengenai situasi dirinya, agar ia mendapat dan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat berperan penting. Hal ini berarti pelaksanaan pembangunan nasional tidak hanya merupakan tugas dari pemerintah. Pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab dari seluruh masyarakat. Dengan demikian pembangunan akan berhasil apabila melibatkan semua

golongan dan lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan disamping bantuan ataupun prakarsa dari pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikatakan berhasil apabila masyarakat dilibatkan dan diikutsertakan secara aktif dan sukarela baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan) serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai.

Selain dari empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan pemberdayaan juga ditujukan untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, social, fisik, maupun mental. Meskipun partisipasi merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkembangkan dalam proses pembangunan, namun didalam prakteknya tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh. Di pihak lain, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan.

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat memberikan indikasi adanya pengakuan (aparatur) pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekadar objek atau penikmat hasil pembangunan melainkan subjek atau pelaku

pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Walupun akhir-akhir ini, konsep pembangunan lebih mengarah pada meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi banyak sekali pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan konsep yang direncanakan. Seperti yang diterangkan oleh Adimihardja (2004) bahwa :

“Pola kebijakan yang selama ini dilaksanakan lebih kuat datang dari atas ke bawah daripada dari bawah ke atas. Tetapi pola atas-bawah ini sedemikian rupa telah mengalami pergeseran paradigma yang mengarah pada keterlibatan semua tingkat dalam kerangka pembangunan partisipatif yang direfleksikan oleh adanya pembagian peran yang jelas pada masing-masing tingkat, yang mengacu pada prinsip semakin ke atas memiliki kewenangan yang lebih luas dalam hal kebijakan, sedangkan semakin ke bawah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam hal operasionalisasi program pembangunan.”

Dalam kondisi demikian diharapkan masyarakat menjadi semakin memperoleh peluang dan dorongan untuk menunjukkan inisiatif dan kreatifitas dalam mengatasi permasalahan yang muncul disekitarnya terutama mengenai pembangunan. Kondisi tersebut mencerminkan perlu adanya pergeseran peran pemerintah, dari peran selama ini yang cenderung sebagai penyelenggara pelayanan sosial (*social services provider*) menjadi fasilitator, mediator, koordinator, pendidik, mobilisator, sistem pendukung dan peran-peran yang lain yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung. Sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat optimal.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa partisipasi yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri sangat diharapkan peranannya dalam

rangka mensukseskan pembangunan di daerah mereka sendiri. Namun yang perlu juga mendapat perhatian adalah jangan sampai terjadi bahwa dengan adanya partisipasi ini masyarakat justru menjadi pihak yang dirugikan. Sebab seringkali model pembangunan yang *top down* hanya menekankan target kuantitas saja tanpa memikirkan kualitas proyek. Hal inilah yang seringkali menurunkan semangat partisipasi dari masyarakat.

Slamet (1985) dalam Totok Mardikanto (2013:91) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu :

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi,
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Keberhasilan pembangunan dapat diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Yang menjadi faktor pendorong keberhasilan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Adanya perencanaan yang matang
2. Partisipasi aktif dari masyarakat
3. Adanya keselarasan dengan nilai-nilai budaya bangsa
4. Adanya penemuan unsur kebudayaan baru (*discovery*)

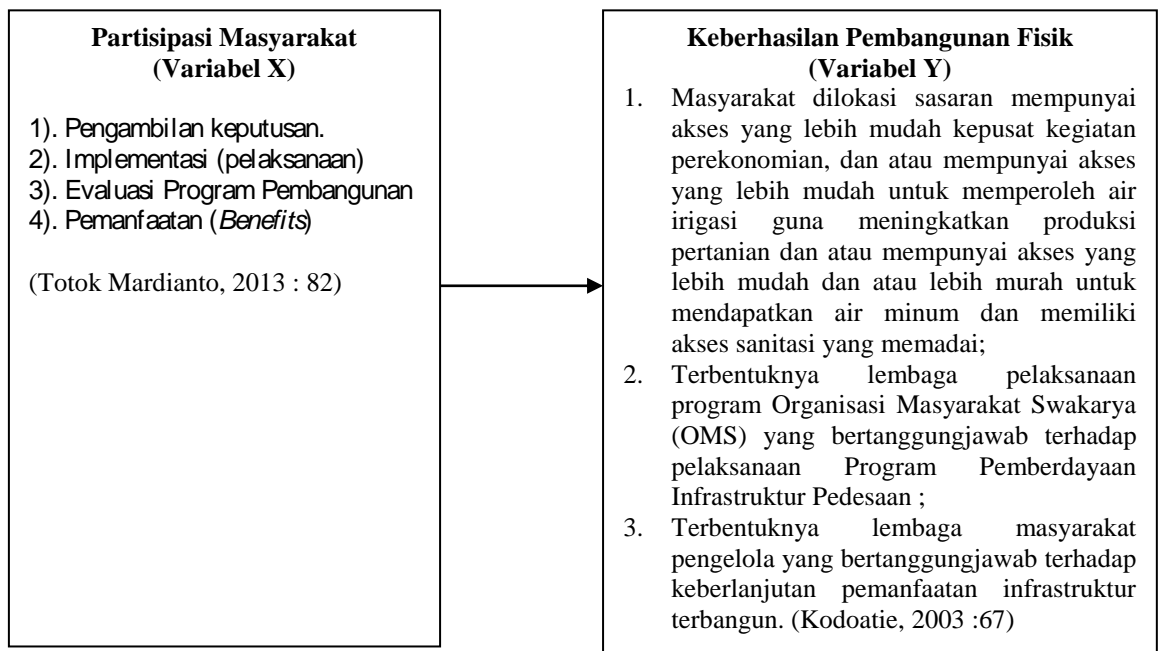
Sedangkan faktor yang menghambat pembangunan cenderung berkaitan dengan sikap mental yang terdapat di dalam diri individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Yang menjadi faktor penghambat pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Pasrah menerima nasib

2. Kurang disiplin
3. Kurang suka kerja keras
4. Tertutup pada pembaharuan
5. Berprasangka terhadap pembaharuan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan skematis seperti berikut dibawah ini :

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



2.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya melalui jalur riset. Dengan kata lain, hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga salah. (Suharsimi Arikunto. 2002, 12).

Dengan demikian hipotesis adalah dugaan sementara yang masih memerlukan penelitian untuk menguji kebenarannya yang akan diuji melalui

penelitian ini ada dua variabel, yaitu partisipasi masyarakat (variable X) dan Keberhasilan pembangunan fisik (variable Y).

Dalam pengujian hipotesis yang diajukan, penulis akan menganalisis hipotesis nol (H_0) dan hipotesis kerja (H_a) sebagai berikut :

$H_0 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat Terhadap keberhasilan pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

$H_a = 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat Terhadap keberhasilan pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode asosiatif yang diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan menguji hipotesis.

Penelitian ini menggunakan metode asosiatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2007 : 11).

Dengan pengertian di atas, sehingga penelitian ini hanya menganalisa pengujian dengan cara mengumpulkan data yang relevan dan dihitung dengan variabel yang diteliti berdasarkan teori. Penelitian dengan judul “Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang” ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah sebuah proses penelitian yang menggunakan sudut pandang penelitian yang melihat langsung antara peneliti dengan fakta yang diteliti bersifat independen, sehingga peneliti dapat menguji realitas fakta secara objektif pada dimensi terbatas, bebas nilai dan tidak biasa.

3.2. Instrumen Penelitian

3.2.1. Sumber dan Jenis Data

Menurut Ruslan (2010: 29) metode sumber data dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer atau data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data-data yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto-foto. Adapun alat-alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data terdiri dari; panduan wawancara, alat perekam (*tape recorder* atau *handphone*), buku catatan, dan kamera digital.

Sedangkan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya adalah data kuantitatif sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif (inferensi). Data kuantitatif yang digunakan partisipasi masyarakat dan keberhasilan pembangunan fisik.

3.2.2. Definisi Operasional

Untuk memudahkan serta mengarahkan penelitian yang dimaksud agar sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dalam penelitian ini dipergunakan beberapa operasional variabel yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan

atau objek yang sedang diteliti. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel independen (X) atau variabel bebas (Partisipasi masyarakat)

Yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, dalam hal ini yang menjadi variabel bebas adalah partisipasi masyarakat.

Yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan.

2. Variabel dependent (Y) atau variabel terikat

Yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya, dalam hal ini yang menjadi variabel terikat adalah pembangunan fisik.

Yang dimaksud dengan pembangunan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep variabel	Indikator	skala
Partisipasi masyarakat (Variabel X)	Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dan kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka,(Totok Mardikanto, Poerwoko Subianto, 2013:82)	1). Pengambilan keputusan. 2). Implementasi (pelaksanaan) 3). Pemanfaatan (<i>Benefits</i>) 4). Evaluasi Program Pembangunan (Totok Mrdianto, 2013 : 82)	Interval
Pembangunan Fisik (variabel Y)	Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang sifatnya hanya memiliki efek jangka pendek Dalam Pembangunan fisik, pemerintah berkewajiban membangun seluruh infrastruktur yang diperlukan masyarakat, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya yang berguna bagi masyarakat. (Stone dalam Kodoatie (2003)	1. Masyarakat dilokasi sasaran mempunyai akses yang lebih mudah kepusat kegiatan perekonomian, dan atau mempunyai akses yang lebih mudah untuk memperoleh air irigasi guna meningkatkan produksi pertanian dan atau mempunyai akses yang lebih mudah dan atau lebih murah untuk mendapatkan air minum dan memiliki akses sanitasi yang memadai; 2. Terbentuknya lembaga pelaksanaan program Organisasi Masyarakat Swakarya (OMS) yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Infrastruktur Pedesaan ; 3. Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur terbangun. (Kodoatie, 2003 :67)	Interval

Sumber : Peneliti

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Melalui observasi (pengamatan) ini penulis mengumpulkan data yang bersumber dari masyarakat tentang bagaimana partisipasi masyarakat yang terjadi di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal serta melihat bagaimana keberhasilan pembangunan fisik yang terjadi di, Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal apakah partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan fisik yang terjadi di, Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu kepada masyarakat dan aparat pemerintah yang bertujuan untuk memperoleh data tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di, Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal.

c. Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Angket digunakan untuk mengumpulkan data Variabel X yaitu partisipasi masyarakat untuk dijadikan sampel dalam penelitian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penyebaran angket sebanyak 22 pertanyaan kepada 91 responden. Selanjutnya jawaban angket tersebut penulis beri skor dengan menggunakan skala sikap (skala likert). Dengan alternative

jawaban sebanyak lima pilihan dimulai dari nilai tertinggi sampai terendah.

Responden yang memilih jawaban a = 5, b = 4, c = 3, d = 4, e = 1.

- d. *Library Research* (Studi Kepustakaan), yaitu metode pengumpulan data yang bersumberkan pada *literature* yang secara langsung berhubungan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.

3.4. Teknik Pengujian Instrumen Penelitian

3.4.1. Uji Validitas

Validitas dalam penelitian dijelaskan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur (Umar Husein, 2010:53). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian dikatakan valid jika dapat mengukur data dari variabel yang diteliti secara tepat

3.4.2. Uji Reliabilitas

Realibilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Menurut Umar Husein (2010:54) mengemukakan bahwa “Realibilitas sebenarnya adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari variabel atau konstruksi. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu”. Pengujian realibilitas pada penelitian ini dilakukan terhadap kuesioner dengan menggunakan rumus *Spearman Brown* :

$$r_i = \frac{2rb}{1+rb}$$

r_i = realibilitas internal seluruh instrument.

r_b = korelasi product moment antara belahan pertama variabel x dan kedua variabel y.

3.4.3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji dimana model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah model regresi pada penelitian ini berdistribusi normal atau tidak adalah dengan melihat grafik histogram dan grafik normal probability plot. Untuk mengetahui apakah semua sampel yang diambil dari populasi tersebut terdistribusi normal atau tidak. Hal ini diperlukan untuk mengetahui jenis statistik yang cocok yang akan digunakan dalam menganalisa data.

Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik (sampel), kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval atau ratio. Asumsi yang utama dari statistik parametris adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Sedangkan statistik nonparametris tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusi. Kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal, statistik nonparametris tidak menuntut terpenuhi banyak asumsi, data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal.

3.5. Populasi dan Sampel Penelitian

3.5.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan semua karakteristik dari obyek yang lengkap dan jelas yang ingin diteliti. Yang mana didalamnya terdapat sasaran yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini merupakan karakter yang ada di dalam penelitian yaitu masyarakat Desa Sukaratu kecamatan Cikeusal serang.

3.5.2. Sampel

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa suatu sampel (Sugiyono, 2007:91) adalah bagian dari suatu populasi, dengan kata lain sample terdiri atas sejumlah satuan analisis yang merupakan bagian dari keseluruhan anggota populasi, oleh karena itu dalam pengambilan sample harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar sampel yang digunakan dapat mewakili populasi yang ada.

Sampel ditentukan dari keseluruhan populasi (N), dimana n (banyaknya sampel) yang digunakan dalam penelitian ini dapat dihitung berdasarkan rumus Slovin (Husen Umar, 2010 : 65) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Dimana :

N = Jumlah Populasi

n = Jumlah sample

e = Persentase kelongaran ketidak pastian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolelir atau diragukan

(Husen Umar, 2010 : 65) rumus ini digunakan untuk penentuan jumlah sample apabila populasi dari sample yang akan diambil diketahui. Jumlah

penduduk Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal sebanyak 910 Kepala Keluarga, sehingga dari informasi jumlah penduduk tersebut dapatlah ditentukan berapa jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini dan sampel yang diambil akan dapat mewakili dari 100 populasi yang ada dengan tingkat error yang ditoleransi terhadap ketidaktepatan pengambilan sampel sebagai pengganti populasi sebesar 0,10 atau $e = 10\%$. Maka jumlah sampel yang diambil adalah :

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{910 \text{ Kepala Keluarga}}{1 + \frac{910 (0,1)^2}{910}} \\
 &= \frac{910}{1 + 910 (0,01)} \\
 &= \frac{910}{1 + 9,1} \\
 &= \frac{910}{10,1} \\
 n &= 91 \text{ kepala keluarga}
 \end{aligned}$$

3.6. Metode Pengolahan Data

3.6.1. Analisis Regresi

Analisa regresi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui persamaan variabel X atas varoabel Y. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Dimana :

$Y = a + bX$

Y = Variabel tidak bebas / dependent

X = Variabel bebas / independent

a = Konstansta

b = Koefisien arah regresi

Berdasarkan rumus diatas dapat dihitung nilai a dan b dengan menggunakan rumus :

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

3.6.2. Rancangan Uji Hipotesis Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan fisik

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris, agar bisa ditarik suatu konsekuensi yang logis kemudian diadakan pengujian (testing) tentang kebenarannya dengan menggunakan berbagai fakta dan beberapa data yang ada.

a. Rumus Hipotesis

- 1) $H_0 : \rho = 0$ tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap pembangunan fisik.
- 2) $H_1 : \rho \neq 0$ ada pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap pembangunan fisik.

b. Menentukan nilai t_{tabel}

Karena uji ini dilakukan dua arah berdasarkan perumusan hipotesisnya maka uji hipotesis dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan nilai derajat kebebasan $(dk) = n - 1 = 91 - 1 = 90$

c. Nilai t_{hitung}

Untuk mengetahui nilai t_{hitung} pada uji t digunakan perhitungan rumus dalam bukunya Sugiyono, (2012 : 260) sebagai berikut :

$$t = \frac{\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Dimana :

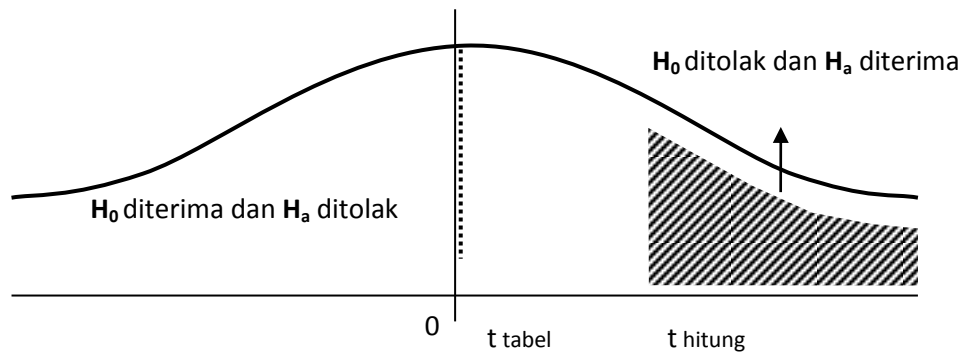
t : uji t

rp : koefisien korelasi parsial

n : jumlah data

d. Menentukan daerah keputusan

Gambar 3.1
Kurve Penerimaan dan penolakan Hipotesis Pengaruh Positif
Antara Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Fisik
Kurva Uji t



e. Pengambilan Keputusan

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan fisik:

1. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, H₀ diterima dan H_a ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap pembangunan fisik.
2. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H₀ diterima artinya artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap pembangunan fisik.

3.6.3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel Partisipasi masyarakat (X) Terhadap pembangunan fisik (Y). Sedangkan untuk menganalisa pengaruh Koefisien Determinasi (KD) antara variabel X dan Y digunakan rumus:

$$KD = r_p^2 \times 100\%$$

Dimana:

Kd = koefisien penentu dalam prosentase

r_p = besarnya koefisien korelasi

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi penelitian ini dalam penyusunan skripsi ini adalah Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. Dengan memperhatikan kondisi yang terjadi di lapangan tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan fisik, kemudian kedua masalah tersebut dijadikan sebagai objek penelitiannya.

3.7.2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Serang dari Bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Juli 2014.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Letak Geografis Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang

Desa Sukaratu terletak di sebelah barat Kecamatan Cikeusal yang menempati di jantung Kota Kecamatan dan merupakan daerah dataran yang mempunyai batasan wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara Desa Sukamaju
- 2) Sebelah Selatan desa Cirangkong Kecamatan Petir
- 3) Sebelah Barat Desa Sukamenak
- 4) Sebelah Timur Desa Cikeusal

Desa Sukaratu mempunyai luas wilayah 422 Ha, merupakan daerah yang berpotensi untuk pengembangan bidang pertanian baik itu perkebunan ataupun persawahan karena didukung dengan lahan yang cukup luas tersedia di wilayah desa.

4.1.2. Jumlah Penduduk Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal

Penduduk merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena penduduk faktor penggerak keberhasilan pembangunan dengan ikutserta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, tanpa adanya partisipasi dari penduduk maka pembangunan tidak akan pernah berhasil. Begitu

juga dengan pembangunan di Desa Sukaratu kecamatan Cikeusal semakin banyak penduduk yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan maka keberhasilan pembangunan akan semakin nyata dirasakan oleh penduduk

Pada tahun 2013 jumlah penduduk Desa Sukaratu sebanyak 3.493 jiwa dimana laki-laki berjumlah 1.798 jiwa dan perempuan berjumlah 1700 jiwa, keadaan tersebut dapat dilihat pada table berikut dibawah ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	
		Frekuensi	Prosentase
1.	Pria	1.700	48,67
2.	Wanita	1.793	51,33
	Total	3.493	100

Dari tabel 4.1 di atas, dapat dilihat komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dari 3.493 jiwa, sebanyak 1.700 jiwa atau 48,67% jenis kelamin pria sedangkan 1.793 jiwa atau 51,33% berjenis kelamin wanita. Hal ini diakibatkan mortalitas angka kelahiran pada 2012 sampai dengan tahun 2013 banyak berjenis kelamin perempuan.

Jika dilihat jumlah penduduk berdasarkan dari usia maka dapat dilihat pada table berikut dibawah ini :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1.	0 – 5 tahun	182	144
2.	6 – 12 tahun	360	328
3	13 – 21 tahun	402	398
4	22 – 45 tahun	574	561
5	> 46 tahun	280	269

Dari tabel 4.2 di atas, dapat dilihat komposisi jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia maka diketahui bahwa usia 22 -45 baik laki-laki maupun perempuan paling banyak di Desa Sukaratu. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia ini daya pikir manusia dalam keadaan produktif baik dari segi kematangan berpikir maupun kematangan dalam berkarya.

4.1.3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang

Pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan, karena Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan.

Berikut ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang adalah dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak menyelesaikan pendidikan	166 orang
2.	SD	861 orang
3.	SLTP	704 orang
4.	SLTA	985 orang
5.	DIPLOMA	-
6.	SARJANA	168 orang

Tabel 4.3 di atas menunjukkan komposisi jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal sebanyak 985

orang berpendidikan SLTA, 861 orang berpendidikan SD dan sebanyak 704 orang berpendidikan SLTP. Hal ini terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang masih rendah.

4.1.4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang

Mata pencaharian merupakan salah satu penentu besarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena semakin besar tingkat pendapatan penduduk maka semakin besar pula bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam pembangunan. Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang diantaranya Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, petani penggarap, buruh tani, pengrajin dan pedagang

Berikut ini mata pencaharian penduduk Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukaratu
Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	93
2	TNI	6
3	POLRI	5
4	Petani	440
5	Pedagang	32
6	Nelayan	0
7	Pengrajin	1
8	Peternak	15
9	Montir	25
10	Dokter	2

Dari tabel 4.4 di atas diketahui mata pencaharian penduduk Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal yang terbanyak adalah petani yaitu berjumlah 440 orang, hal ini daerah Sukaratu berpotensi untuk pengembangan bidang pertanian baik untuk perkebunan maupun persawahan.

4.1.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang yaitu digunakan untuk pemukiman, perkantoran, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan fasilitas umum .

Adapun data mengenai penggunaan lahan di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 4.5
Penggunaan Lahan di Desa Sukaratu
Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang

No	Penggunaan Lahan	Jumlah
1	Pemukiman	86 Ha
2	Perkantoran	1,5 Ha
3	Pertanian	120 Ha
4	Perkebunan	204,7 ha
5	Peternakan	0,6 Ha
6	Perikanan	-
7	Fasilitas umum	1,2 Ha
8	Fasilitas social	-
9	Pertambangan	-
10	Lain-lain	-

Dari tabel 4.5 di atas diketahui penggunaan lahan di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal adalah perkebunan yaitu berjumlah 204,7 Ha, hal ini Desa Sukaratu memiliki dataran yang luas sehingga dapat digunakan oleh penduduknya sebagai perkebunan.

4.1.6. Fasilitas Lembaga Pendidikan

Bentuk pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang salah satunya adalah pembangunan lembaga pendidikan dari mulai tingkat Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SLTA bahkan Keagamaan.

Adapun lembaga pendidikan yang telah didirikan di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini

Tabel 4.6
Lembaga Pendidikan di Desa Sukaratu
Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	3 sekolah
2	SD/ sederajat	4 sekolah
3	SMP/ Sederajat	4 sekolah
4	SLTA / sederajat	2 sekolah
5	Keagamaan	1 sekolah

Dari tabel 4.6 di atas diketahui lembaga pendidikan di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan SMA sudah dibangun hal ini menunjukkan bahwa Desa Sukaratu telah memiliki fasilitas pendidikan yang dapat menampung para pelajar Desa Sukaratu untuk tetap sekolah dekat dengan perumahannya.

4.2. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga Desa Sukaratu Kecamatan Cikuesal yaitu sebanyak 91 responden. Di bawah ini akan diuraikan

lebih lanjut mengenai karakteristik responden yang terlibat dalam penelitian yang penulis lakukan berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, pendidikan terakhir, dan Mata Pencaharian.

1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	
		Frekuensi	Prosentase
1.	Pria	51	56,04
2.	Wanita	40	43,96
	Total	91	100

Dari tabel di atas, dapat dilihat komposisi jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dari 91 responden sebanyak 51 responden atau 56,04% jenis kelamin pria sedangkan 40 responden atau 43,96% berjenis kelamin wanita.

Hal ini karena Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan- perbedaan hak dan kewajiban anatar pria dan wanita.

2. Karakteristik berdasarkan Tingkat Usia

Tabel 4.8
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Keterangan	Jumlah	
		Frekuensi	Prosentase
1.	< 20 tahun	-	-
2.	20 – 29 tahun	12	13,19
3	30 – 39 tahun	40	43,96
4	40 – 49 tahun	33	36,26
5	> 50 tahun	6	6,59
	Total	91	100

Dari tabel di atas, dapat dilihat komposisi jumlah responden berdasarkan tingkat usia dari 91 responden sebanyak 40 responden atau 43,96% berusia 30 – 39 tahun, 33 responden atau 36,26% berusia 40 – 49 tahun, 12 responden atau 13,19% berusia 20 – 29 tahun, 6 responden atau 11,54% berusia lebih dari 50 tahun.

Hal ini karena dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan. Usia berpengaruh terhadap keaktifan dalam berpartisipasi.

3. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.9
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Keterangan	Jumlah	
		Frekuensi	Prosentase
1.	Tidak menyelesaikan pendidikan	6	6,59
2.	SD	30	32,97
3	SLTP	24	26,36
4	SLTA	21	23,08
5	DIPLOMA	10	10,99
6	SARJANA	-	-
	Total	91	100

Tabel 4.9 di atas menunjukkan komposisi jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan dari 91 responden. Hasil Pengumpulan data menunjukkan

responden yang berpendidikan SD sebanyak 30 responden atau 32,97%, SLTA sebanyak 21 atau 23,08%, SLTP sebanyak 24 responden atau 26,36%, Diploma sebanyak 10 responden atau 10,99% sedangkan responden yang tidak menyelesaikan pendidikan sebanyak 6 responden atau 6,59%.

4. Karakteristik Mata Pencaharian

Tabel 4.10
Karakteristik Responden Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Keterangan	Jumlah	
		Frekuensi	Prosentase
1.	Pegawai Negeri Sipil	1	1,09
2.	TNI	2	2,19
3	POLRI	2	2,19
4	Petani	45	49,45
5	Pedagang	10	10,99
6	Pengrajin	5	5,49
7	Peternak	16	17,58
8	Montir	10	10,99
	Total	91	100

Tabel 4.10 di atas menunjukkan komposisi jumlah responden berdasarkan mata pencaharian dari 91 responden. Hasil Pengumpulan data menunjukkan bahwa petani sebanyak 45 responden atau 49,45%, peternak sebanyak 16 responden atau 17,58%, pedagang dan montir sebanyak 10 responden atau 10,99%, sedangkan pengrajin sebanyak 5 responden atau 5,49% serta TNI, Polri dan Pegawai Negeri sipil masing-masing sebanyak 2 responden atau 2,91% dan 1 responden atau 1,09%

4.3. Tanggapan Responden

1. Tanggapan responden terhadap Pernyataan Variabel X (Partisipasi Masyarakat) di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya penerapan partisipasi masyarakat di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang dapat dilihat dari tanggapan responden melalui pengisian kuesioner yang penulis sebarkan kepada responden

Tabel 4.11
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan fisik

		Frequency	Percent
Valid	Sangat Tidak setuju	0	0
	Tidak setuju	0	0
	Kurang setuju	14	15,4
	Setuju	41	45,1
	Sangat setuju	36	39,6
	Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.11 di atas diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 41 responden atau sebesar 45,1% mengenai tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan fisik, responden yang menjawab sangat setuju sebesar 39,6% atau sebanyak 36 responden, sedangkan yang menjawab kurang setuju sebesar 15,4% atau sebanyak 14 responden.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan sangatlah penting karena disinilah masyarakat diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, ide-ide serta saran-saran agar pembangunan

fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang berjalan sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakatnya.

Hal ini berkaitan erat dengan teori Cohen dalam bukunya Totok Mardikanto (2013:82) Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam proses rencana pembangunan, biasanya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bertujuan untuk memilih alternatif dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4.12
Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dalam pengambilan Keputusan melibatkan masyarakat

	Frequency	Percent
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak setuju	1	1,1
Kurang setuju	4	4,4
Setuju	29	31,9
Sangat setuju	57	62,6
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.12 diatas diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebesar 62,6% atau 57 responden mengenai Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melibatkan masyarakat, responden yang menjawab setuju sebesar 31,9% atau 29 responden sedangkan yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju masing-masing sebesar 4,4% dan 1,1%.

Pada tahap perencanaan ini merupakan tahap yang sangat penting bagi masyarakat karena masyarakat dilibatkan oleh aparat desa pada program pembangunan fisik baik berupa pembuatan proposal pengajuan dana bantuan pembangunan fisik maupun dalam pelaksanaannya.

Hal ini berkaitan erat dengan teori Cohen dalam bukunya Totok Mardikanto (2013:82) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau tingkat lokal

Tabel 4.13
Tingkat Partisipasi masyarakat mengenai Jumlah Anggaran Yang diberikan Pemerintah

	Frequency	Percent
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak setuju	3	3,3
Kurang setuju	20	22,0
Setuju	30	33,0
Sangat setuju	38	41,8
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.13 diatas diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebesar 41,8% atau 38 responden mengenai tingkat partisipasi masyarakat mengenai jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah, responden yang menjawab setuju sebesar 33% atau 30 responden, responden yang menjawab kurang setuju sebesar 22% atau 20 responden sedangkan responden yang menjawab tidak setuju sebesar 3,3% atau 3 responden.

Pada tahap ini sangatlah penting bagi masyarakat karena masyarakat diberitahu oleh aparat pemerintah berapa jumlah anggaran

yang diminta untuk program Pembangunan fisik. Dengan demikian agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah.

Hal ini berkaitan erat dengan teori Cohen dalam bukunya Totok Mardikanto (2013:82) yang menyatakan bahwa Setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak.

Tabel 4.14
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam menyumbangkan materiil/uang

	Frequency	Percent
Sangat Tidak setuju	0	0
Tidak setuju	3	3,3
Kurang setuju	20	22,0
Setuju	48	52,7
Sangat setuju	20	22,0
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.14 diatas diketahui bahwa responden yang menjawab setuju sebesar 52,7% atau 38 responden mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan materiil/uang dalam pelaksanaan pembangunan fisik, responden yang menjawab sangat setuju dan kurang setuju sebesar 22% atau 20 responden, sedangkan responden yang menjawab tidak setuju sebesar 3,3% atau 3 responden.

Dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat ikut berpartisipasi menyumbangkan harta bendanya yaitu dengan cara mengumpulkan uang

semampunya untuk terlaksananya program pembangunan dan demi kemajuan pembangunan di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

Hal ini dikarenakan uang sebagai bentuk partisipasi yang sangat mudah dilakukan selain dalam bentuk barang/materii guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang pada kalangan atas.

Tabel 4.15
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menyumbangkan Tenaga

	Frequency	Percent
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak setuju	3	3,3
Kurang setuju	43	47,3
Setuju	24	26,4
Sangat setuju	21	23,1
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.15 diatas diketahui bahwa responden yang menjawab kurang setuju sebesar 47,3% atau 43 responden mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan tenaga, responden yang menjawab setuju sebesar 26,4% atau 24 responden, yang menjawab sangat setuju sebesar 23,1% atau 21 responden sedangkan yang menjawab tidak setuju sebesar 3,3% atau 3 responden.

Pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat sukarela menyumbangkan tenaga agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan sehingga kemajuan pembangunan di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

Hal ini karena masyarakat pedesaan ikut serta berdasarkan atas keyakinannya bahwa proyek itu akan bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas, tanpa mengharapkan upah yang tinggi. Sebaliknya, kalau mereka hanya diperintah dan dipaksa oleh atasan untuk menyumbangkan tenaga atau harta bendanya kepada proyek tadi, maka mereka tidak akan turut berpartisipasi dengan semangat tadi.

Tabel 4.16
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam bergotong royong menyelesaikan pembangunan fisik

	Frequency	Percent
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak setuju	5	5,5
Kurang setuju	47	51,6
Setuju	24	26,4
Sangat setuju	15	16,5
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.16 tersebut diatas diketahui bahwa responden yang menjawab kurang setuju sebesar 51,6% atau 47 responden mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam bergotong royong dalam menyelesaikan pembangunan fisik, responden yang menjawab setuju sebesar 26,4% atau 24 responden, responden yang menjawab sangat setuju sebesar 16,5% atau 15 responden sedangkan yang menjawab tidak setuju sebesar 5,5% atau 5 responden.

Hal ini karena di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang budaya gotong royong yang menjadi tradisi bangsa Indonesia sudah semakin pudar. Banyak sekali masyarakat yang tidak peduli akan pentingnya gotong royong mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadinya seperti mengisi waktu luang mereka dengan berekreasi atau istirahat dengan keluarga di rumah.

Tabel 4.17
Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pengawasan
kegiatan pembangunan fisik

	Frequency	Percent
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak setuju	7	7,6
Kurang setuju	6	6,5
Setuju	28	30,4
Sangat setuju	50	54,3
Total	91	98,9

Berdasarkan tabel 4.17 tersebut diatas diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebesar 54,3% atau 50 responden mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pembangunan fisik, responden yang menjawab setuju sebesar 30,4% atau 28 responden, sedangkan sisanya menjawab tidak setuju dan kurang setuju.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi sangat penting masyarakat dilibatkan dalam pengawasan kegiatan pembangunan fisik karena dalam evaluasi program pembangunan masyarakat merupakan penggerak dari pembangunan maka sudah seharusnya dilibatkan dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik bertujuan agar dapat dicapai

pembangunan seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan serta mencari solusi pemecahan dalam setiap permasalahan mengenai pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

Tabel 4.18
Tingkat Partisipasi masyarakat Dalam
mengungkapkan gagasan

	Frequency	Percent
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak setuju	7	7,7
Kurang setuju	1	1,1
Setuju	48	52,7
Sangat setuju	35	38,5
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.18 tersebut diatas diketahui bahwa responden yang menjawab setuju sebesar 52,7% atau 48 responden mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam mengungkapkan beberapa gagasannya, responden yang menjawab sangat setuju sebesar 38,5% atau 35 responden, sedangkan sisanya menjawab tidak setuju dan kurang setuju masing-masing sebesar 7,7% dan 1,1%.

Pada tingkat partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi pembangunan merupakan tahap yang paling menentukan keberhasilan daro pembangunan tersebut disini masyarakat aktif mengungkapkan gagasannya. Hal ini karena pada tahap evaluasi merupakan tahap penilaian

bagi keberhasilan pembangunan baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, partisipasi masyarakat dikedepankan agar terus berjalan pembangunan yang berkelanjutan dan bersinergi bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Tabel 4.19
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan
program pembangunan

	Frequency	Percent
Sangat tidak setuju	0	0
Tidak setuju	7	7,7
Kurang setuju	7	7,7
Setuju	25	27,5
Sangat setuju	52	57,1
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.19 tersebut diatas diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebesar 57,1% atau 52 responden mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan program pembangunan, responden yang menjawab setuju sebesar 27,5% atau 25 responden, sedangkan sisanya menjawab tidak setuju dan kurang setuju yaitu sebesar 7,7% atau 7 responden.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam evaluasi masyarakat sangat penting karena pada saat ini masyarakat diikursertakan untuk memantau jalannya pembangunan, penilaian masyarakat sangatlah berpengaruh untuk program pembangunan berkelanjutan

Tabel 4.20
Tingkat Partisipasi masyarakat Dalam
pemanfaatan hasil pembangunan

	Frequency	Percent
Sangat tidak setuju		
Tidak setuju	7	7,7
Kurang setuju	1	1,1
Setuju	73	80,2
Sangat setuju	10	11,0
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.20 tersebut diatas diketahui bahwa responden yang menjawab setuju sebesar 80,2% atau 73 responden mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan, responden yang menjawab sangat setuju sebesar 11% atau 10 responden, sedangkan sisanya menjawab tidak setuju dan kurang setuju yaitu sebesar 7,7% atau 7 responden.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan sangatlah penting karena masyarakat diharapkan untuk ikut dalam pemanfaatan hasil pembangunan masyarakat dan dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya hasil pembangunan fisik

Hal ini berkaitan dengan teori Cohen dan Uphoff (Didi Prayitno, 2008:21) banyak cara untuk mengklarifikasikan dan menganalisis manfaat-manfaat dari hasil pembangunan seperti ikut serta memelihara dan menjaga pembangunan yang sudah ada.

Tabel 4.21
Tingkat Partisipasi masyarakat dalam
meningkatkan kesejahteraan hidupnya

	Frequency	Percent
Sangat Tidak setuju	0	0
Tidak Stuju	0	0
Kurang setuju	4	4,4
Setuju	59	64,8
Sangat setuju	28	30,8
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.21 tersebut diatas diketahui bahwa responden yang menjawab setuju sebesar 64,8% atau 59 responden mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, responden yang menjawab sangat setuju sebesar 30,8% atau 28 responden, sedangkan sisanya menjawab kurang setuju sebesar 4,4% atau 4 responden.

Dalam pemanfaatan hasil pembangunan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, hal ini karena seluruh infrastruktur dapat dipergunakan untuk segala aktifitas baik kesehatan, pemerintahan dan pendidikan pada umumnya serta perekonomian pada khususnya yaitu dengan cara berdagang, bertani, berkebun, beternak, montir dan lain sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Tabel 4.22
Tingkat Partisipasi masyarakat dalam merawat dan memanfaatkan
hasil pembangunan fisik

	Frequency	Percent
Sangat tidak setuju	0	0
Tidak Setuju	2	2,2
Kurang Setuju	0	0
Setuju	50	54,9
Sangat setuju	39	42,9
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.22 tersebut diatas diketahui bahwa responden yang menjawab setuju sebesar 54,9% atau 50 responden mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam merawat dan memanfaatkan hasil pembangunan responden yang menjawab sangat setuju sebesar 42,9% atau 39 responden, sedangkan sisanya menjawab tidak setuju sebesar 2,2% atau 2 responden.

Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat penting karena masyarakat ikut berpartisipasi merawat dan memanfaatkan hasil pembangunan fisik di desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. Karena dengan begitu hasil pembangunan akan bertahan lama jika dirawat dengan baik oleh masyarakat.

Hal ini berkaitan dengan teori Cohen dan Uphoff (Didi Prayitno, 2008:21) banyak cara untuk mengklarifikasikan dan menganalisis manfaat-manfaat dari hasil pembangunan seperti ikut serta memelihara dan menjaga serta memanfaatkan hasil pembangunan fisik yang sudah ada dengan cara yang bijaksana untuk kepentingan bersama.

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan dari 91 responden terhadap Partisipasi masyarakat maka diperoleh hasil seperti tabel berikut di bawah ini:

Tabel 4.23
Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap
Variabel X (Tingkat Partisipasi Masyarakat)

Pernyataan	Tanggapan Responden											
	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Perencanaan pembangunan fisik	36	39,6	41	45,1	14	15,4	-	0	-	0	91	100
Pengambilan keputusan melibatkan masyarakat	57	62,6	29	31,9	4	4,4	1	1,1	-	0	91	100
Jumlah anggaran yang diberikan pemerintah	38	41,8	30	33,0	20	22,0	3	3,3	-	0	91	100
Menyumbangkan materiil/uang	20	22,0	48	52,7	20	22,0	3	3,3	-	0	91	100
Menyumbangkan tenaga	21	23,1	24	26,4	43	47,3	3	3,3	-	0	91	100
Bergotong royong menyelesaikan pemb. Fisik	15	16,5	24	26,4	47	51,6	5	5,5	-	0	91	100
Pengawasan kegiatan pembangunan fisik	50	54,3	28	30,4	6	6,5	7	7,6	-	0	91	100
Mengungkapkan gagasan	35	38,5	48	52,7	1	1,1	7	7,7	-	0	91	100
Pemantauan program pembangunan	52	57,1	25	27,5	7	7,7	7	7,7	-	0	91	100
Pemanfaatan hasil pembangunan	10	11,0	73	80,2	1	1,1	7	7,7	-	0	91	100
Meningkatkan kesejahteraan hidupnya	28	30,8	59	64,8	4	4,4	-	0	-	0	91	100
Merawat dan memanfaatkan hasil pemb. Fisik	39	42,9	50	54,9	0	0	2	2,2	-	0	91	100
Jumlah	401		479		167		45		-			

Data tabel 4.22 tersebut di atas dianalisis berdasarkan scoring setiap jawaban atau tanggapan dari responden diperoleh jumlah skor hasil pengumpulan data yaitu :

$$\text{Jumlah skor untuk 401 yang menjawab SS} = 401 \times 5 = 2005$$

$$\text{Jumlah skor untuk 479 yang menjawab S} = 479 \times 4 = 1916$$

$$\text{Jumlah skor untuk 169 yang menjawab KS} = 167 \times 3 = 501$$

$$\text{Jumlah skor untuk 43 yang menjawab TS} = 45 \times 2 = 90$$

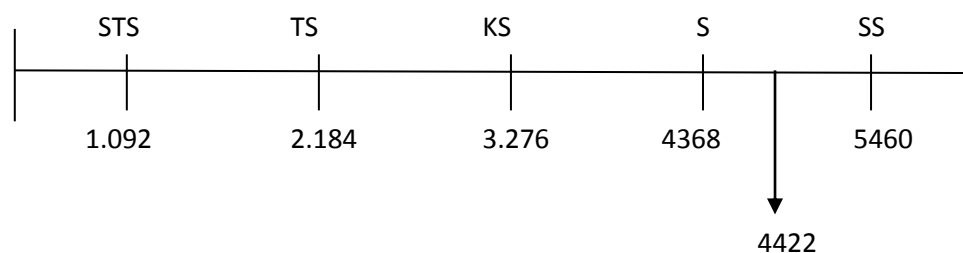
$$\text{Jumlah skor untuk 0 yang menjawab STS} = 0 \times 1 = 0$$

$$\text{Jumlah skor} = 4.422$$

Jumlah skor kritarium (bila setiap butir indikator mendapat skor tertinggi = 5) maka digunakan rumus : skor tertinggi x indikator x responden diperoleh : Jumlah skor tertinggi = $5 \times 12 \times 91 = 5.460$

Jumlah skor kritarium (bila setiap butir indikator mendapat skor terendah = 1) maka digunakan rumus : skor terendah x indikator x responden diperoleh : Jumlah skor terendah = $1 \times 12 \times 91 = 1.092$

Dengan demikian X_1 (partisipasi masyarakat) menurut persepsi 91 responden itu sebesar $(4.422 : 5.460) \times 100\% = 80,99\%$ dari kriteria yang ditetapkan. Hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut :



Nilai 4.422 termasuk dalam kategori interval setuju dan sangat setuju. Tetapi lebih mendekati setuju.

2. Tanggapan responden terhadap pernyataan Variabel Y (Keberhasilan Pembangunan Fisik) di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya penerapan keberhasilan pembangunan Fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten

Serang dapat dilihat dari tanggapan responden melalui pengisian kuesioner yang penulis sebarakan kepada responden.

Tabel 24
Keberhasilan pembangunan dapat mempengaruhi aspek kehidupan

	Frequency	Percent
Sangat Tidak setuju	0	0
Tidak setuju	2	2,2
Kurang setuju	15	16,5
Setuju	42	46,2
Sangat setuju	32	35,2
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.24 tersebut diatas diketahui bahwa responden yang menjawab setuju sebesar 46,2% atau 42 responden mengenai kondisi infrastruktur baik jalan maupun jembatan yang baik banyak masyarakat menggunakan jalan-jalan tersebut untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan perekonomiannya, responden yang menjawab sangat setuju sebesar 35,2% atau 32 responden, sedangkan sisanya menjawab kurang setuju sebesar 16,5% atau 5 responden dan responden yang menjawab tidak setuju sebesar 2,2% atau 2 orang.

Dengan adanya kondisi infrastruktur berupa jalan maupun jembatan yang baik banyak masyarakat menggunakan jalan-jalan tersebut untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan perekonomiannya seperti banyaknya angkot, kendaraan bermotor dan kendaraan roda dua.

Tabel 4.25
Keberhasilan Pembangunan dapat meningkatkan hasil pertanian dan perekonomian masyarakat

	Frequency	Percent
Sangat Tidak setuju	0	0
Tidak setuju	2	2,2
Kurang setuju	6	6,6
Setuju	30	33,0
Sangat setuju	53	58,2
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.25 tersebut diatas diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebesar 58,2% atau 53 responden mengenai keberhasilan pembangunan dapat meningkatkan hasil pertanian dan perekonomian masyarakat, responden yang menjawab sangat setuju sebesar 33% atau 30 responden, sedangkan sisanya menjawab kurang setuju sebesar 6,6% atau 6 responden dan responden yang menjawab tidak setuju sebesar 2,2% atau 2 orang.

Karena keberhasilan pembangunan membuat kondisi irigasi yang baik hal ini dapat meningkatkan hasil pertanian khususnya di bidang persawahan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat infrastruktur berupa saluran irigasi merupakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan sehingga dapat merubah perekonomian masyarakat desa menjadi lebih baik.

Tabel 4.26
Keberhasilan pembangunan dalam pembuatan saluran air minum yang bersih sehingga kesehatan masyarakat dapat terjaga

	Frequency	Percent
Sangat Tidak setuju	0	0
Tidak setuju	2	2,2
Kurang setuju	21	23,1
Setuju	30	33,0
Sangat setuju	38	41,8
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.26 tersebut diatas diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebesar 41,8 % atau 38 responden mengenai keberhasilan pembangunan dalam pembuatan saluran air minum yang bersih sehingga kesehatan masyarakat dapat terjaga, responden yang menjawab sangat setuju sebesar 33% atau 30 responden, sedangkan sisanya menjawab kurang setuju sebesar 23,1% atau 21 responden dan tidak setuju sebesar 2,2% atau 2 responden.

Saluran air minum yang bersih merupakan hal yang paling penting bagi setiap manusia dengan selalu mengkonsumsi air bersih masyarakat dapat terhindar dari segala macam penyakit seperti diare, muntaber dan penyakit kulit.

Tabel 4.27
Keberhasilan pembangunan Tersedianya MCK (Masak, Cuci, Kakus) dan sanitasi yang baik dan memadai sehingga masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan

	Frequency	Percent
Sangat tidak setuju	1	1,1
Tidak setuju	8	8,8
Kurang setuju	11	12,1
Setuju	46	50,5
Sangat setuju	25	27,5
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.27 tersebut diatas diketahui bahwa responden yang menjawab setuju sebesar 50,5 % atau 46 responden mengenai keberhasilan pembangunan tersedianya MCK (Masak, Cuci, Kakus) dan sanitasi yang baik dan memadai sehingga masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan, responden yang menjawab sangat setuju sebesar 27,5% atau 25 responden, sedangkan sisanya menjawab kurang setuju sebesar 12,1% atau 11 responden dan tidak setuju sebesar 8,8% atau 8 responden serta sangat tidak setuju sebesar 1,1% atau 1 responden.

Keberhasilan pembangunan di bidang infrastruktur dapat menciptakan MCK (Masak, Cuci, Kakus) dan sanitasi yang baik dan memadai sehingga masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan sehingga masyarakat dapat menjalankan pola hidup sehat. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang telah memiliki jamban sendiri di rumah dan masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

Tabel 4.28
Keberhasilan Pembangunan dengan menggerakkan karang taruna

	Frequency	Percent
Sangat Tidak setuju	0	0
Tidak setuju	3	3,3
Kurang setuju	34	37,4
Setuju	27	29,7
Sangat setuju	27	29,7
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.28 tersebut diatas diketahui bahwa responden yang menjawab setuju dan sangat setuju sebesar 29,7% atau 27 responden mengenai keberhasilan pembangunan dapat menggerakkan karang taruna, sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju sebesar 37,4% atau 34 responden, tidak setuju sebesar 3,3% atau 3 responden.

Kegiatan gotong royong sangat penting dilakukan oleh masyarakat baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan karena dengan gotong royong selain tetap menjaga tali silaturahmi antar warga masyarakat terutama kepada para pemuda yang semakin memudar dan untuk menggerakkan kembali kesadaran dari masyarakat akan pentingnya gotong royong. Dengan adanya karang taruna diharapkan masyarakat yang bersih lingkungan baik di sekitar rumahnya maupun di lingkungan Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

Hal ini jika dilihat dari keadaan pada saat ini budaya gotong royong yang sudah mulai memudar di lingkungan masyarakat maka dengan

dibentuk kembali budaya gotong royong diharapkan keberhasilan pembangunan akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Tabel 4.29
Tingkat Keberhasilan Pembangunan dapat dilihat dengan dibangunnya
Majlis taklim

	Frequency	Percent
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	0	0
Kurang setuju	47	51,6
Setuju	28	30,8
Sangat setuju	16	17,6
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.29 tersebut diatas diketahui bahwa responden yang menjawab kurang setuju sebesar 51,6% atau 47 responden mengenai tingkat keberhasilan pembangunan dapat dilihat dengan dibangunnya Majlis Taklim, sedangkan responden yang menyatakan setuju sebesar 30,8% atau 28 responden, sangat setuju sebesar 17,6% atau 16 responden.

Tingkat Keberhasilan pembangunan disini yaitu dari segi keagamaan dimana Dengan dibentuknya majlis taklim dapat meningkatkan kehidupan beragama di wilayah Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

Tetapi bagi masyarakat Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang kurang setuju jika keberhasilan pembangunan hanya dilihat dengan membangun majlis taklim karena bagi masyarakat Desa Sukaratu kegiatan keagamaan yang mereka lakukan seperti pengajian cukup dilaksanakan di masjid-masjid atau mushola-mushola.

Tabel 4.30
Keberhasilan Pembangunan dengan mendirikan koperasi pedesaan

	Frequency	Percent
Valid Sangat tidak setuju	1	1,1
Tidak setuju	2	2,2
Kurang setuju	2	2,2
Setuju	34	37,4
Sangat setuju	52	57,1
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.30 tersebut diatas diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebesar 57,1% atau 52 responden mengenai tingkat keberhasilan pembangunan dengan mendirikan koperasi pedesaan, sedangkan responden yang menyatakan setuju sebesar 37,4% atau 34 responden, kurang setuju dan tidak setuju sebesar 2,2% atau 2 responden sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 1,1% atau 1 responden.

Dengan adanya koperasi pedesaan dapat meningkatkan perekonomian warganya Hal ini karena koperasi merupakan perwujudan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sehingga dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat pedesaan.

Tabel 4.31
Keberhasilan pembangunan dengan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan (terbuka)

	Frequency	Percent
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak setuju	4	4,4
Kurang setuju	3	3,3
Setuju	45	49,5
Sangat setuju	39	42,9
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.31 tersebut diatas diketahui bahwa responden yang menjawab setuju sebesar 49,5% atau 45 responden mengenai Tingkat keberhasilan pembangunan dengan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan (terbuka), sedangkan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 42,9% atau 39 responden, sisanya menjawab kurang setuju dan tidak setuju.

Tingkat keberhasilan pembangunan dalam bidang pemerintahan diwujudkan dengan terlaksananya penyelenggaraan Hal ini karena dalam program pembangunan dibutuhkan sikap pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang transparan dimana kegiatan ini dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparent*). Transparansi antara lain dilakukan melalui penyebaran informasi terkait program secara akurat dan mudah diakses oleh masyarakat

Tabel 4.32
Keberhasilan pembangunan dengan Terciptanya penyelenggaraan
pembangunan yang baik dan bertanggung jawab (akuntabel)

	Frequency	Percent
Sangat tidak setuju	0	0
Tidak setuju	1	1,1
Kurang setuju	7	7,7
Setuju	27	29,7
Sangat setuju	56	61,5
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.32 tersebut diatas diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebesar 61,5% atau 56 responden mengenai Tingkat keberhasilan pembangunan dengan terciptanya penyelenggaraan

pembangunan yang baik dan bertanggung jawab (akuntabel), sedangkan responden yang menyatakan setuju sebesar 29,7% atau 27 responden, sisanya menjawab kurang setuju dan tidak setuju.

Hal ini karena dalam program pembangunan dibutuhkan sikap pemerintah sebagai penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, dan mutu pekerjaan.

Tabel 4.33
Keberhasilan pembangunan dengan terciptanya penyelenggaraan pembangunan yang baik dan bijaksana

	Frequency	Percent
Sangat tidak setuju	0	0
Tidak setuju	0	0
Kurang setuju	5	5,5
Setuju	70	76,9
Sangat setuju	16	17,6
Total	91	100,0

Berdasarkan tabel 4.33 tersebut diatas diketahui bahwa responden yang menjawab setuju sebesar 76,9% atau 70 responden mengenai Tingkat keberhasilan pembangunan fisik dengan terciptanya penyelenggaraan pembangunan yang baik dan bijaksana, sedangkan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 17,6% atau 16 responden, sisanya menjawab kurang setuju

Hal ini karena dalam program pembangunan dibutuhkan sikap pemerintah sebagai penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*) yang ditandai dengan adanya rencana pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan

infrastruktur terbangun secara mandiri oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari pembangunan fisik.

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan dari 91 responden terhadap Keberhasilan pembangunan fisik maka diperoleh hasil seperti tabel berikut di bawah ini:

Tabel 4.34
Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap
Variabel Y (Keberhasilan Pembangunan)

Pernyataan	Tanggapan Responden											
	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Mempengaruhi aspek kehidupan	32	35,2	42	46,2	15	16,5	2	2,2	0	0	91	100
Meningkatkan hasil pertanian dan perekonomian masyarakat	53	58,2	30	33,0	6	6,6	2	2,2	0	0	91	100
Pembuatan saluran air minum yang bersih sehingga kesehatan masyarakat dapat terjaga	38	41,8	30	33,0	21	23,1	2	2,2	0	0	91	100
Tersedianya MCK (Masak, Cuci, Kakus) dan sanitasi yang baik dan memadai sehingga masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan	25	27,5	46	50,5	11	12,1	8	8,8	1	1,1	91	100
Menggerakkan karang taruna	27	29,7	27	29,7	34	37,4	3	3,3	0	0	91	100
Dapat dilihat dengan dibangunnya majlis taklim	16	17,6	28	30,8	47	51,6	0	0	0	0	91	100
Mendirikan koperasi pedesaan	52	57,1	34	37,4	2	2,2	2	2,2	1	1,1	91	100
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan (terbuka)	39	42,9	45	49,5	3	3,3	4	4,4	0	0	91	100
Terciptanya penyelenggaraan pembangunan yang baik dan bertanggungjawab (akuntabel)	56	61,5	27	29,7	7	7,7	1	1,1	0	0	91	100
Terciptanya penyelenggaraan pembangunan yang baik dan bijaksana	16	17,6	70	76,9	5	5,5	0	0	0	0	91	100
	354		379		151		24		2			

Data tabel 4.22 tersebut di atas dianalisis berdasarkan scoring setiap jawaban atau tanggapan dari responden diperoleh jumlah skor hasil pengumpulan data yaitu :

Jumlah skor untuk 354 yang menjawab SS	= 354 x 5	= 770
Jumlah skor untuk 379 yang menjawab S	= 379 x 4	= 516
Jumlah skor untuk 151 yang menjawab KS	= 151 x 3	= 453
Jumlah skor untuk 24 yang menjawab TS	= 24 x 2	= 86
Jumlah skor untuk 2 yang menjawab STS	= 2 x 1	= 2
Jumlah skor		= 3.789

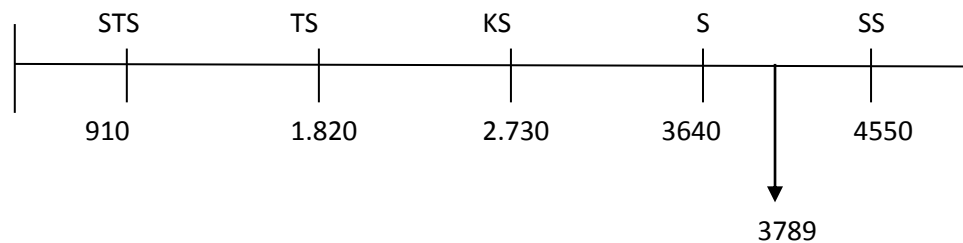
Jumlah skor kritarium (bila setiap butir indikator mendapat skor tertinggi = 5) maka digunakan rumus : skor tertinggi x indikator x responden diperoleh :

$$\text{Jumlah skor tertinggi} = 5 \times 10 \times 91 = 4.550$$

Jumlah skor kritarium (bila setiap butir indikator mendapat skor terendah = 1) maka digunakan rumus : skor terendah x indikator x responden diperoleh :

$$\text{Jumlah skor terendah} = 1 \times 10 \times 91 = 910$$

Dengan demikian Y (Keberhasilan pembangunan) menurut persepsi 91 responden itu sebesar $(3.789 : 4.550) \times 100\% = 83,27\%$ dari kriteria yang ditetapkan. Hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut :



Nilai 3.789 termasuk dalam kategori interval setuju dan sangat setuju. Tetapi lebih mendekati setuju.

4.4. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Dengan menggunakan korelasi product moment, maka di dapat uji validitas instrumen sebagai berikut :

Tabel 4.35
Pengujian Validitas Variabel X (Partisipasi Masyarakat)

		TotX	Keterangan
Pertanyaan 1	Correlation Coefficient	,635**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,000	
	N	91	
Pertanyaan 2	Correlation Coefficient	,512**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,000	
	N	91	
Pertanyaan 3	Correlation Coefficient	,646**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,000	
	N	91	
Pertanyaan 4	Correlation Coefficient	,602**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,000	
	N	91	
Pertanyaan 5	Correlation Coefficient	,517**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,000	
	N	91	
Pertanyaan 6	Correlation Coefficient	,241*	Valid
	Sig. (2 tailed)	,021	
	N	91	
Pertanyaan 7	Correlation Coefficient	,366**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,000	
	N	91	
Pertanyaan 8	Correlation Coefficient	,315**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,002	
	N	91	
Pertanyaan 9	Correlation Coefficient	,340**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,001	
	N	91	
Pertanyaan 10	Correlation Coefficient	,504**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,000	
	N	91	
Pertanyaan 11	Correlation Coefficient	,392**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,068	
	N	91	
Pertanyaan 12	Correlation Coefficient	,336**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,734	
	N	91	
Tot_X	Correlation Coefficient	1	
	Sig. (2 tailed)		
	N	91	

Keterangan : Korelasi pada taraf signifikan 5% (0,05)

(Sumber : Data Primer yang telah diolah IBM SPSS 19)

Berdasarkan tabel 4.35 diatas diperoleh koefisien korelasi semua butir pernyataan dengan skor total di atas 0,2 sehingga semua butir instrument Partisipasi masyarakat (X) dinyatakan valid. Butir yang mempunyai validitas tertinggi adalah butir nomor tiga dengan koefisien korelasi 0,646 dan paling rendah adalah butir nomor enam dengan koefisien korelasi 0,241.

Tabel 4.36
Pengujian Validitas Variabel Y (Keberhasilan Pembangunan)

		TotX	Keterangan
Pertanyaan 1	Correlation Coefficient	,725**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,000	
	N	91	
Pertanyaan 2	Correlation Coefficient	,400**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,000	
	N	91	
Pertanyaan 3	Correlation Coefficient	,637**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,000	
	N	91	
Pertanyaan 4	Correlation Coefficient	,533**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,000	
	N	91	
Pertanyaan 5	Correlation Coefficient	,574**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,000	
	N	91	
Pertanyaan 6	Correlation Coefficient	,568**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,000	
	N	91	
Pertanyaan 7	Correlation Coefficient	,223*	Valid
	Sig. (2 tailed)	,033	
	N	91	
Pertanyaan 8	Correlation Coefficient	,497**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,000	
	N	91	
Pertanyaan 9	Correlation Coefficient	,350**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,001	
	N	91	
Pertanyaan 10	Correlation Coefficient	,374**	Valid
	Sig. (2 tailed)	,099	
	N	91	
Tot_Y	Correlation Coefficient	1	
	Sig. (2 tailed)		
	N	91	
		,725**	

Keterangan : Korelasi pada taraf signifikan 5% (0,05)

(Sumber : Data Primer yang telah diolah IBM SPSS 19)

Berdasarkan tabel 4.36 diatas diperoleh koefisien korelasi semua butir pernyataan dengan skor total di atas 0,2 sehingga semua butir instrument Keberhasilan Pembangunan (Y) dinyatakan valid. Butir yang mempunyai validitas tertinggi adalah butir nomor satu dengan koefisien korelasi 0,725 dan paling rendah adalah butir nomor tujuh dengan koefisien korelasi 0,223.

2. Uji Reliability

Uji reabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa instrument yang digunakan memiliki konsistensi dalam hasil pengukuran. Pengujian realibilitas dengan menggunakan Alpha Cronbach's. Berikut ini hasil pengujian realibilitas antara partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan Fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

Tabel 4.37
Pengujian Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha	Nilai Tabel		Keterangan
		α 5%	α 1%	
X	0,575	0,207	0,270	Reliabel
Y	0,706	0,207	0,270	Reliabel

(Sumber : Data Primer yang telah diolah IBM SPSS 19)

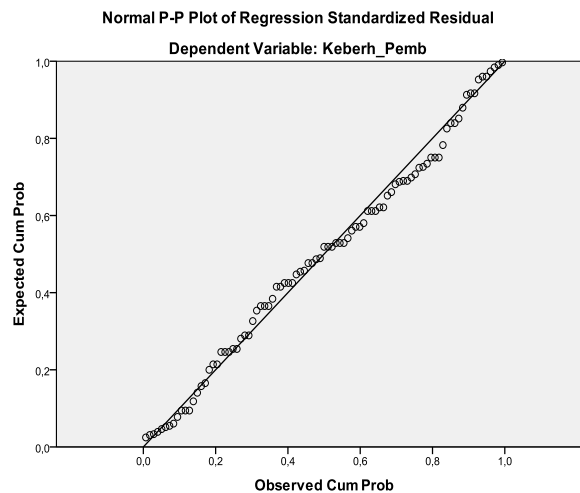
Berdasarkan tabel 4.37 diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian dikatakan reliable, karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari r_{tabel} dengan α 5% = 0,207 dan α 1% = 0,270 dengan N = 91. Maka instrument tersebut reliabel karna harga r_{xy} (0,706) > r_{tabel} α 5% = 0,207 > α 1% = 0,270. Dengan demikian maka instrument tersebut dapat dilanjutkan untuk bahan pengujian selanjutnya.

3. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak sehingga mampu menghindari terjadinya bias pada model regresi. Uji normalitas dapat dibaca dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk memenuhi asumsi normalitas, data harus menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal (Sunyoto 2009 : 89).

Hasil pengolahan SPSS pada penelitian ini untuk uji normalitas Partisipasi masyarakat dan Keberhasilan Pembangunan Fisik dapat dilihat pada grafik 4.1. berikut ini:

Grafik 4.1
Grafik Normalitas Data
Partisipasi Masyarakat dan Keberhasilan Pembangunan Fisik



(Sumber : Data Primer yang telah diolah IBM SPSS 19)

Grafik P-Plot dari model regresi partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunantampak pada grafik 4.1 di atas. Berdasarkan tampilan grafik tersebut, tampak bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga model regresi ini memenuhi asumsi normal.

4.5. Analisis Regresi

Analisis regresi adalah regresi dimana sebuah variabel terikat yaitu Keberhasilan Pembangunan fisik (Y) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas yaitu partisipasi masyarakat (X).

Tabel 4.38
Regresi Sederhana
Partisipasi masyarakat (X) terhadap
Keberhasilan Pembangunan Fisik (Y)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,661	3,695		2,615	,010
Part_Mas y	,644	,074	,677	8,681	,000

a. Dependent Variable: Keberh_Pemb

(Sumber : Data Primer yang telah diolah IBM SPSS 19)

Berdasarkan tabel 4.38 diatas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = 9,661 + 0,644X$$

Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut:

1. Apabila Konstanta sebesar 9,661; artinya jika partisipasi masyarakat (X) nilainya adalah 0, maka keberhasilan pembangunan (Y) nilainya adalah 9,661.
2. Apabila Koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat (X) sebesar 0,644; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan partisipasi masyarakat mengalami kenaikan 1%, maka keberhasilan pembangunan fisik (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,644. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara partisipasi masyarakat dengan keberhasilan pembangunan fisik, semakin naik partisipasi masyarakat maka semakin meningkat keberhasilan pembangunan fisik.

4.6. Koefisien determinasi

Koefisien determinasi (KD) berguna untuk mengukur seberapa besar peranan variabel partisipasi masyarakat (X) menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel keberhasilan pembangunan fisik (Y).

Mengenai hasil perhitungan partisipasi masyarakat dan keberhasilan pembangunan fisik yang dianalisis dengan menggunakan program SPSS 19.0 diperoleh hasil koefisien determinasi sebagai berikut :

Tabel 4.39
Koefisien determinasi
Partisipasi masyarakat (X) terhadap
Keberhasilan Pembangunan Fisik (Y)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,877 ^a	,769	,763	3,72568

a. Predictors: (Constant), Part_Masy

b. Dependent Variable: Keberh_Pemb

(Sumber : Data Primer yang telah diolah IBM SPSS 19)

$$KD = 0,877^2 \times 100\% = 76,9\%$$

Koefisien determinasi sebesar 76,9% artinya bahwa kontribusi partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pemangunan fisik sebesar 76,9% sedangkan sisanya merupakan kontribusi dari faktor usia, jenis kelamin, pendidikan dan pemerintahan yang terbuka, bertanggungjawab dan berkesinambungan.

4.7. Rancangan Uji Hipotesis

Suatu koefisien harus mempunyai nilai yang berarti (signifikan). Adapun pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut :

1) Kriteria Pengujian Hipotesis

- a. $H_0 : \beta = 0$: Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.
- b. $H_a : \beta \neq 0$: Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

2) Menentukan nilai t-hitung dan t-tabel

Untuk menguji signifikansi apakah hipotesis yang ditetapkan semula diterima atau ditolak, dengan cara membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. Hasil yang didapat dari IBM SPSS 19 memberikan t-hitung untuk masing-masing variabel independen seperti tabel di bawah ini;

Tabel 4.40
Hasil Uji t-Hipotesis
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,661	3,695		2,615	,010
Part_Mas y	,644	,074	,677	8,681	,060

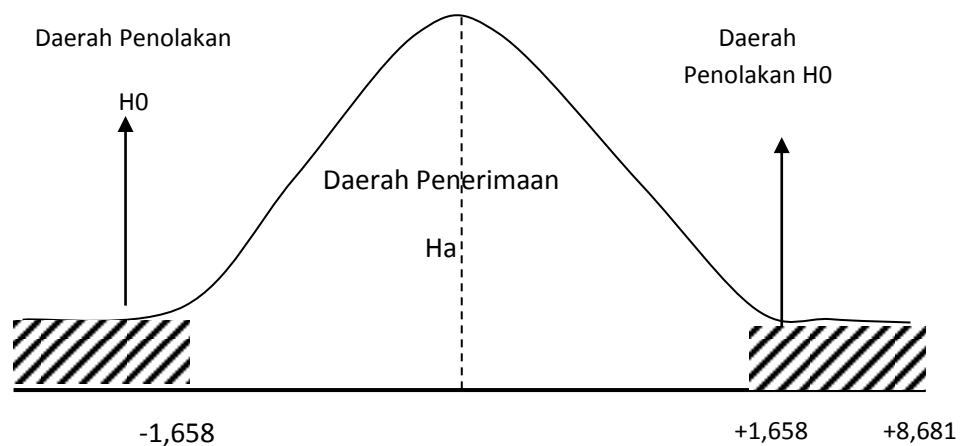
a. Dependent Variable: Keberh_Pemb

(Sumber : Data Primer yang telah diolah IBM SPSS 19)

Berdasarkan tabel 4.37 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 8,681 sedangkan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan derajat pembilang $m = 2$ dan derajat penyebut digunakan $n - m = 91 - 2 = 89$, maka t_{tabel} sebesar 1,658. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ $8,681 > 1,658$ dan $\text{sig} > 0,05$ ($0,060 > 0,05$). Maka hipotesis kerja (H_0) ditolak, artinya secara terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan fisik.

3) Menentukan Daerah Penerimaan Uji Hipotesis

Gambar 4.2
Kurva uji Hipotesis



Dengan melihat gambar 4.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai t_{hitung} ($8,681$) $>$ t_{tabel} ($1,658$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

4.8. Pembahasan

Setelah dilakukan uji t hitung antara partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan fisik diperoleh t-hitung (8,681) > t-tabel (1,658) maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. Kemudian koefisien regresi X sebesar 0,644 menyatakan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan partisipasi masyarakat mengalami kenaikan 1%, maka keberhasilan pembangunan fisik (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,567. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara partisipasi masyarakat dengan keberhasilan pembangunan fisik, semakin naik partisipasi masyarakat maka semakin meningkat keberhasilan pembangunan fisik. Kontribusi partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan fisik sebesar 45,83% sedangkan sisanya merupakan kontribusi dari faktor-faktor lain.

Dengan demikian maka antara partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan fisik berpengaruh signifikan hal ini berarti keberhasilan pembangunan fisik tidak akan tercapai tanpa adanya partisipasi masyarakat. Karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap program pembangunan baik yang bersifat fisik maupun sosial. Pemerintah mempunyai dana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan tetapi jika tidak akan pernah terwujud apabila masyarakat tidak diikutsertakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun pemanfaatan hasil pembangunan.

Jika dilihat dari Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang dilihat dari 91 sampel yang memberikan jawaban angket yaitu berada pada kategori setuju. Hal ini berarti partisipasi masyarakat dikatakan berhasil apabila masyarakat dilibatkan dan diikutsertakan secara aktif dan sukarela baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) masyarakat setuju aparat pemerintah desa untuk mengikutsertakan dalam setiap tahap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam program pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun tahap pemanfaatan hasil-hasil pembangunan secara langsung dilibatkan untuk sama-sama membangun desanya akan tercipta pembangunan yang transparan (terbuka), partisipasif, akuntabel (bertanggungjawab), dan berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan teori Cohen dan Uphoff (1977:8) menyatakan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat penerima program pembangunan terdiri dari : 1). Pengambilan keputusan, 2). Implementasi, 3). Pemanfaatan (*Benefits*) dan 4). Evaluasi Program Pembangunan.

Tingkat keberhasilan pembangunan fisik yang sudah dicapai oleh masyarakat Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang dapat dikatakan berhasil jika masyarakat dilokasi sasaran mempunyai akses yang lebih mudah kepusat kegiatan perekonomian, dan atau mempunyai akses yang lebih mudah untuk memperoleh air irigasi guna meningkatkan produksi pertanian dan atau mempunyai akses yang lebih mudah dan atau lebih murah untuk

mendapatkan air minum dan memiliki akses sanitasi yang memadai; sudah terbentuknya lembaga pelaksanaan program Organisasi Masyarakat Swakarsa (OMS) yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Infrastruktur Pedesaan ; dan Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur terbangun.

Dari uraian di atas dapat diperjelas lagi tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah dicapai oleh masyarakat Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang yaitu :

1. Sudah terlaksananya pembangunan jalan-jalan dan jembatan-jembatan yang dapat dipergunakan oleh masyarakat Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.
2. Sudah terlaksananya irigasi bagi persawahan masyarakat Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.
3. Sudah tersedianya air minum yang bersih bagi masyarakat Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.
4. Sudah tersedianya MCK dan sanitasi yang memadai bagi masyarakat Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.
5. Sudah terbentuknya karang taruna yang bertugas untuk menggerakkan gotong royong di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.
6. Sudah terbentuknya koperasi pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

7. Sudah terlaksananya pembangunan yang transparan (terbuka), akuntabel (bertanggung jawab) dan berkelanjutan dari aparat pemerintah Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dengan memperhatikan hasil analisis yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut::

1. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang yang ditunjukkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam keberhasilan pembangunan fisik dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
2. Keberhasilan pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan semakin baik pembangunan infrastruktur jalan, pengairan, jembatan, gorong-gorong, tembok penahan tanah, sarana pendidikan dan tempat ibadah sudah dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan layak.
3. Berdasarkan analisis statistik tentang pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. Serta Koefisien determinasi sebesar 76,9% artinya bahwa kontribusi partisipasi

masyarakat terhadap keberhasilan pemangunan fisik sebesar 76,9% sedangkan sisanya merupakan kontribusi dari faktor usia, jenis kelamin, pendidikan dan pemerintahan yang terbuka, bertanggungjawab dan berkesinambungan.

5.2. Saran-saran

Dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran-saran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga keberhasilan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh warga. Adapun saran yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Meskipun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan fisik cukup baik, akan tetapi bukan berarti warga masyarakat dan aparat pemerintah desa merasa puas dengan situasi yang ada. Penulis mengharapkan, baik aparat pemerintah maupun masyarakat lebih meningkatkan partisipasi dan peransertanya sesuai dengan tugasnya sehingga hasil pembangunan akan lebih maksimal.
2. Meskipun keberhasilan pembangunan fisik dikualifikasikan cukup baik, akan tetapi masyarakat diharapkan untuk lebih menjaga dan merawat hasil pembangunan sehingga berdampak pada pembangunan baik pembangunan jangka pendek, menengah maupun panjang serta aparat pemerintahan maupun masyarakatnya untuk dapat lebih terbuka, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
3. Bagi aparat pemerintahan desa, setelah penelitian ini dilakukan diharapkan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan lebih ditingkatkan. Pembinaan

terhadap aparat pemerintah desa lebih dimaksimalkan dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sehingga pemerintah dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru, dilengkapi Pedoman Umum EYD untuk SD, SLTP, SMU dan umum*, Jakarta, Sandro Jaya
- Adimihardja, 2004, *Participatory Research Appraisal dal Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Edisi Kedua, Bandung Humaniora Utama Press
- Ali Hanapiah Muhi, 2011, *Fenomena Pembangunan Desa* Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat
- Arikunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Arnstein, Sherry R, 1995, *A Ladder of Citizen Participation dalam Jay M. Stein, (ed) Classic Reading in Urban Planning : Introduction*, Mc Graw Hill, Inc, New York.
- Conyers, 1991, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, Suatu Pengantar, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Didi Prayitno, 2008, *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang*
- Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline versi 1.1 Freeware*, (Pusat Bahasa : www.pusatbahasa.diknas.go.id, 2013).
- Edi Suharto, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan social*, Bandung, Rafika Aditama
- Herman Abdullah, 2009, *Geliat Pembangunan Kota Pekan baru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*, Jakarta, PT Wahana Semesta Intermedia
- Julius Bobo, 2003, *Transformasi ekonomi Rakyat*, Jakarta, Cidesindo
- Kodoatie, R.J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Mardiasmo, 2004, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Andi Yogyakarta
- Mikkelsen, Britha 2003, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Penerbit Alfabeta Bandung
- Rahardjo, 2010, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Rochajat Harun, Elvinaro Ardianto, 2011, *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial Perspektif Dominan, Kaji Ulang dan Teori Kritis*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada
- Rustiningsih Sri, 2002. *Laporan Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan paket 4 di 8 Kabupaten di Jawa Timur* 2002
- Roestanto, 2004, *Potret Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Indonesia*, PT. Media Nusa Pradana, Jakarta
- Siagian P Sondag, 2012, *Administrasi Pembangunan, Konsep, dimensi dan Strateginya*, Jakarta, Bumi Aksara
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D* Bandung, PT Alfabeta
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, 2013, *Pemberdayaan masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta
- Umar Husein, *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada
- Walgito, Bimo, 2009, *Psikologi Sosial (suatu pengantar)*, Yogyakarta, Andi
- Y. Slamet, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press, Surakarta
- Yulianti, Rina, 2000, *Efektivitas Metode Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Limbah Perkotaan di Perumahan Mojosongo Surakarta*, Semarang, Magister Teknik Pembangunan Kota Undip.
- Zulkarimen Nasution, 2009, *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Edisi Revisi, Jakarta, Rajagrafindo Persada

Sumber lain

(<http://turindraatp.blogspot.com>)

(<http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/>,
Diakses tanggal 13 September 2013)

([http://septosuhanda.wordpress.com/2012/08/22/indonesia-dan-pembangunan -
dibidang-infrastruktur-septo-indarto-team-double-s/](http://septosuhanda.wordpress.com/2012/08/22/indonesia-dan-pembangunan-dibidang-infrastruktur-septo-indarto-team-double-s/))

IDENTITAS RESPONDEN

- Nama :
- Jenis kelamin : Pria Wanita
- Usia : 20-25 thn 25-35 thn
 35-45 thn >45 thn
- Pendidikan Terakhir : SD/ Sederajat SMP/Sederajat
 SMU/ Sederajat Diploma (D1, D2, D3)
 Strata 1 (S1) Strata 2 (S2,) Strata 3 (S3)
 Tidak menyelesaikan pendidikan
- Tinggal di kel. Sukaratu: 0-5 thn 5-10 thn
 10-15 > 15 thn

Petunjuk pengisian kuisioner

Simaklah setiap pernyataan dengan seksama. Pilih jawaban yang dinilai sesuai dengan kondisi masyarakat/saudara/i dengan cara memberikan tanda checklist (√) pada alternatif jawaban yang tersedia.

Keterangan jawaban :

- SS : Sangat setuju (poin 5)
- S : Setuju (poin 4)
- KS : Kurang Setuju (poin 3)
- TS : Tidak Setuju (poin 2)
- STS : Sangat Tidak Setuju (poin 1)

**DAFTAR PERNYATAAN
PARTISIPASI MASYARAKAT (X)**

No	Daftar pernyataan Partisipasi Masyarakat (X)	Pilihan jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
A	PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
1	Dalam pengambilan keputusan masyarakat ikut berpartisipasi pada tahap perencanaan pembangunan fisik					
2	Dalam pengambilan keputusan masyarakat dilibatkan oleh aparat desa program pembangunan fisik					
3	Dalam pengambilan keputusan masyarakat diberikan kemudahan akses untuk mengetahui berapa jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah					
B	PELAKSANAAN					
4	Dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat sukarela menyumbangkan materil/uang dalam pelaksanaan pembangunan fisik					
5	Dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat sukarela menyumbangkan tenaga dalam pelaksanaan pembangunan fisik					
6	Dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat bergotong royong dalam menyelesaikan pembangunan fisik					
C	EVALUASI					
7	Dalam evaluasi program pembangunan masyarakat dilibatkan dalam mengawasi kegiatan pembangunan fisik					
8	Dalam evaluasi program pembangunan masyarakat aktif mengungkapkan penilaiannya					
9	Dalam evaluasi program pembangunan masyarakat diikutsertakan memantau jalannya pembangunan					
D	PEMANFAATAN					
10	Dalam pemanfaatan hasil pembangunan masyarakat dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya hasil pembangunan fisik					
11	Dalam pemanfaatan hasil pembangunan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya					
12	Dalam pemanfaatan hasil pembangunan masyarakat ikut berpartisipasi merawat dan memanfaatkan hasil pembangunan fisik					

**DAFTAR PERNYATAAN
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN FISIK (Y)**

No	Daftar pernyataan Keberhasilan Pembangunan Fisik (Variabel Y)	Pilihan jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
A	MASYARAKAT MEMPEROLEH PEREKONOMIAN AIR IRIGASI, AIR MINUM DAN MEMILIKI AKSES SANITASI YANG MEMADAI					
1.	Dengan adanya kondisi infrastruktur baik jalan maupun jembatan yang baik banyak masyarakat menggunakan jalan-jalan tersebut untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan perekonomiannya					
2.	Dengan kondisi irigasi yang baik dapat meningkatkan hasil pertanian khususnya di bidang persawahan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat					
3.	Tersedianya saluran air minum yang bersih sehingga kesehatan masyarakat dapat terjaga					
4.	Tersedianya MCK (Masak, Cuci, Kakus) dan sanitasi yang baik dan memadai sehingga masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan					
B	TERBENTUKNYA LEMBAGA PELAKSANAAN PROGRAM ORGANISASI MASYARAKAT SWAKARYA (OMS) YANG BERTANGGUNGJAWAB					
5.	Dengan adanya karang taruna diharapkan masyarakat yang bersih lingkungan dengan rutin melaksanakan gotong royong di lingkungan					
6.	Dengan dibentuknya majlis taklim dapat dapat meningkatkan kehidupan beragama					
7.	Dengan adanya koperasi pedesaan dapat meningkatkan perekonomian warganya					
C.	TERBENTUKNYA LEMBAGA MASYARAKAT PENGELOLA YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KEBERLANJUTAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR TERBANGUN					
8.	Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan yang transparan (terbuka)					
9.	Terciptanya penyelenggaraan pembangunan yang baik dan bertanggung jawab (akuntabel)					
10.	Terciptanya penyelenggaraan pembangunan yang baik dan bijaksana sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari pembangunan fisik					

TABULASI DATA VARIABEL X

NO	ITEM SOAL												SKOR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	5	2	5	4	3	3	5	5	5	4	4	5	51
2	5	5	2	4	3	3	5	5	5	4	4	4	49
3	5	4	4	2	4	5	4	5	5	5	5	5	53
4	5	5	5	2	3	3	5	5	5	2	4	4	48
5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	54
6	5	5	5	4	3	3	5	2	3	4	5	5	49
7	5	5	5	4	3	3	5	5	5	4	4	4	52
8	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	4	5	57
9	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	55
10	5	5	5	5	5	3	3	4	5	4	5	4	53
11	4	5	4	4	3	3	3	5	5	4	4	4	48
12	4	5	4	4	3	3	5	5	5	4	5	5	52
13	4	5	3	3	3	3	5	4	5	4	5	5	49
14	5	5	5	4	3	3	5	5	5	4	4	5	53
15	5	5	5	5	3	3	5	5	5	4	4	4	53
16	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	54
17	5	5	5	5	5	3	5	4	5	4	4	5	55
18	5	5	5	5	5	4	5	2	4	4	5	5	54
19	4	5	3	3	3	3	5	4	5	4	5	4	48
20	4	5	3	3	3	3	5	4	5	4	4	5	48
21	4	5	4	4	3	3	5	5	5	4	4	4	50
22	4	5	4	4	3	3	5	5	5	4	5	4	51
23	4	5	4	4	3	3	2	5	5	4	4	5	48
24	5	5	5	4	3	3	2	5	5	4	5	5	51
25	5	5	5	4	3	3	2	5	5	4	4	4	49
26	5	5	5	4	3	3	5	5	5	4	4	4	52
27	5	5	5	4	3	3	2	5	5	4	4	4	49
28	5	5	5	4	3	3	2	5	5	4	5	4	50
29	5	5	5	4	3	3	5	2	5	4	4	4	49
30	5	4	5	4	3	3	5	5	5	4	5	5	53
31	5	5	2	5	5	4	5	4	4	4	4	4	51
32	5	5	2	5	4	4	5	2	4	4	5	5	50
33	3	5	3	3	3	3	5	4	5	4	4	5	47
34	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	56
35	5	5	5	2	5	4	5	2	5	4	5	5	52
36	5	5	5	5	2	5	5	5	5	4	4	4	54
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
39	4	5	3	3	2	3	5	4	5	4	4	4	46
40	4	5	4	4	2	3	4	2	5	4	4	5	46
41	4	5	4	4	3	2	4	2	2	3	5	5	43
42	4	5	4	4	3	2	4	5	2	4	4	5	46
43	3	5	3	3	3	2	5	4	5	4	4	4	45
44	5	5	5	5	5	2	5	4	3	4	5	2	50

45	5	5	5	5	5	3	5	4	2	4	5	4	52
46	5	5	5	5	5	3	5	3	3	4	4	4	51
47	5	5	5	5	5	3	5	4	2	4	5	5	53
48	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	4	4	52
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	58
50	3	5	3	3	3	3	4	4	2	4	4	4	42
51	3	5	3	3	3	3	4	4	5	4	5	5	47
52	3	4	3	3	3	3	5	4	2	2	5	4	41
53	3	5	3	3	3	3	4	4	4	2	4	5	43
54	3	4	3	3	3	3	4	4	4	2	4	5	42
55	3	5	3	3	3	3	5	4	5	4	5	4	47
56	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	5	43
57	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	44
58	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	43
59	4	5	4	4	4	3	5	5	5	4	4	5	52
60	4	5	4	4	3	4	5	5	5	4	4	4	51
61	4	5	4	4	3	3	5	5	5	4	4	4	50
62	4	5	3	3	3	3	5	4	5	4	4	5	48
63	4	5	3	3	3	3	5	4	5	4	4	5	48
64	4	5	3	3	3	3	5	4	5	4	4	4	47
65	4	5	3	3	4	4	2	4	4	4	4	5	46
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	46
67	3	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	52
68	4	4	4	4	4	3	9	4	5	2	4	4	51
69	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	45
70	5	3	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	48
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	47
74	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	52
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
76	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	51
77	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	3	4	50
78	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	51
79	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	50
80	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	50
81	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	53
82	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	49
83	3	4	5	4	5	4	5	5	4	5	3	5	52
84	4	4	3	3	3	2	2	4	4	4	5	4	42
85	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	50
86	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	45
87	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	52
88	4	4	4	4	5	5	3	4	3	4	4	5	49
89	4	4	4	4	3	3	4	4	5	2	4	4	45
90	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	5	46
91	3	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	53

TABULASI DATA VARIABEL Y

NO	ITEM SOAL										SKOR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
2	5	5	5	4	5	5	2	5	5	5	46
3	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	47
4	5	5	4	2	3	3	5	5	5	4	41
5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	45
6	5	5	5	4	3	3	5	5	5	5	45
7	3	4	5	4	3	3	5	5	5	4	41
8	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	48
9	5	4	3	2	5	4	5	4	4	4	40
10	4	2	5	5	5	3	5	4	5	4	42
11	4	5	4	4	3	3	5	5	5	4	42
12	4	5	5	5	3	3	5	5	5	4	44
13	4	5	3	2	3	3	5	4	5	4	38
14	5	5	5	4	3	3	3	5	5	4	42
15	5	5	5	5	3	3	4	4	5	4	43
16	4	3	2	4	4	5	4	5	5	4	40
17	4	4	5	5	5	3	5	4	5	5	45
18	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	47
19	4	5	3	3	3	3	5	4	5	5	40
20	4	4	3	3	4	3	5	2	5	4	37
21	4	5	4	4	3	3	5	5	5	4	42
22	4	5	4	4	3	3	5	5	5	4	42
23	4	5	4	4	3	3	5	2	5	4	39
24	5	5	5	4	3	3	5	5	5	4	44
25	5	5	5	4	5	3	5	5	5	4	46
26	5	5	5	4	5	4	5	5	5	3	46
27	5	5	3	4	3	3	5	5	5	4	42
28	5	3	3	4	3	3	5	5	5	4	40
29	5	5	5	5	3	3	5	5	5	4	45
30	5	5	5	4	3	3	2	2	5	5	39
31	5	5	5	5	5	4	1	4	4	4	42
32	5	5	5	5	2	4	5	4	4	4	43
33	3	5	3	3	4	3	5	4	5	4	39
34	5	5	2	5	4	4	5	4	5	4	43
35	5	5	4	3	5	4	4	5	5	5	45
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
38	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48
39	4	5	3	3	4	4	5	4	5	5	42
40	4	5	4	4	3	4	4	5	5	4	42
41	4	5	4	2	3	3	4	5	5	4	39
42	4	5	4	2	3	3	4	5	5	4	39
43	3	5	3	1	3	3	5	4	5	4	36
44	5	5	5	4	2	3	5	4	3	4	40
45	5	5	5	5	5	3	5	4	3	5	45
46	5	3	5	5	5	3	5	3	3	4	41

47	5	5	5	5	5	3	5	4	3	4	44
48	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
49	5	4	5	2	5	5	5	5	5	5	46
50	3	5	3	4	3	3	4	4	5	4	38
51	3	5	3	5	3	3	4	4	5	4	39
52	3	4	3	3	3	3	5	4	4	4	36
53	3	5	3	4	3	3	4	4	4	4	37
54	3	4	3	3	4	3	4	4	4	5	37
55	3	5	3	3	3	4	5	4	5	4	39
56	3	2	3	2	3	3	4	4	4	4	32
57	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	33
58	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	33
59	5	5	4	4	4	3	5	5	5	4	44
60	4	5	4	2	3	4	5	5	5	4	41
61	4	5	4	4	3	3	5	5	5	4	42
62	4	5	3	4	3	3	5	4	5	4	40
63	4	5	3	4	2	3	5	2	5	4	37
64	4	5	3	3	3	3	5	5	5	5	41
65	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	43
66	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	37
67	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	45
68	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	42
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
70	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	36
71	4	4	4	4	3	3	4	5	2	4	37
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
73	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	37
74	3	4	5	4	5	4	5	5	4	4	43
75	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	37
76	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	43
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
78	4	4	5	4	5	4	5	5	4	3	43
79	3	4	4	4	4	3	4	3	4	5	38
80	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	44
81	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	44
82	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	42
83	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	43
84	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	42
85	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	42
86	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	45
87	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	41
88	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	42
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
90	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41
91	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	44

		,911	,903	,912	,902	,772	,110	,026	,994	,815	,000
N		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Part_11	Pearson Correlation	,301**	,044	,071	-,073	,025	-,212	-,094	1	-,008	,392
	Sig. (2-tailed)	,004	,680	,504	,492	,814	,044	,374	,941	,688	,068
N		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Part_12	Pearson Correlation	-,141	-,096	-,209*	,025	-,011	-,127	,021	-,008	1	,336
	Sig. (2-tailed)	,182	,364	,047	,813	,919	,229	,841	,941	,734	,91
N		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Tot_X	Pearson Correlation	,635**	,646**	,602**	,512**	,366**	,315**	,340**	,392	,336	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,021	,000	,000	,000	,002	,001	,068	,734	,91
N		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		,410		,517		,941		,339		,853		,280		,098	
		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Tot_Y	Pearson Correlation	,725**	,400**	,637**	,533**	,574**	,566**	,223*	,497**	,350**	,174	1			
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,033	,000	,001	,089				
	N	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Uji Reliabilitas Variabel X dan Variabel Y

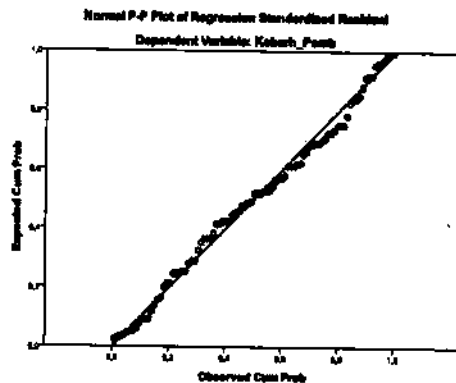
Variable X

Cronbach's Alpha	N of Items
,575	12

Variable Y

Cronbach's Alpha	N of Items
,706	11

4. Uji Normalitas Data Partisipasi Masyarakat dan Keberhasilan Pembangunan Fisik



5. Regresi Linier Partisipasi masyarakat (X) terhadap keberhasilan pembangunan Fisik (Y)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,681	3,895		2,615	,010
Part Masy	,644	,074	,677	8,681	,000

a. Dependent Variable: Keberh_Pemb

6. Koefisien Determinasi

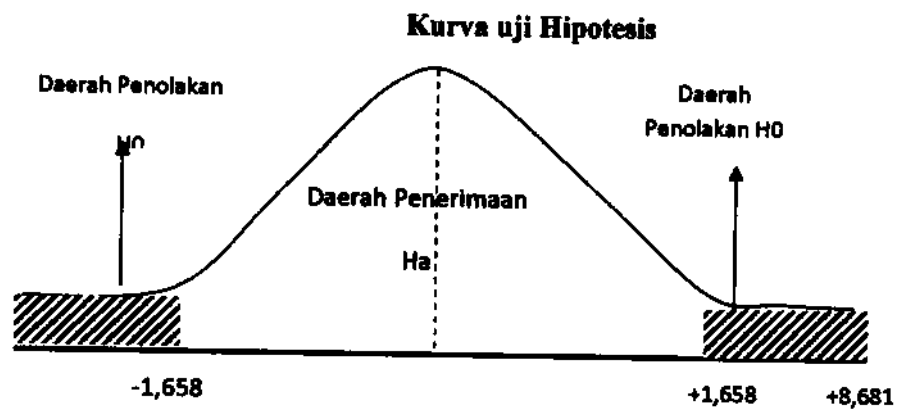
Model Summary^a

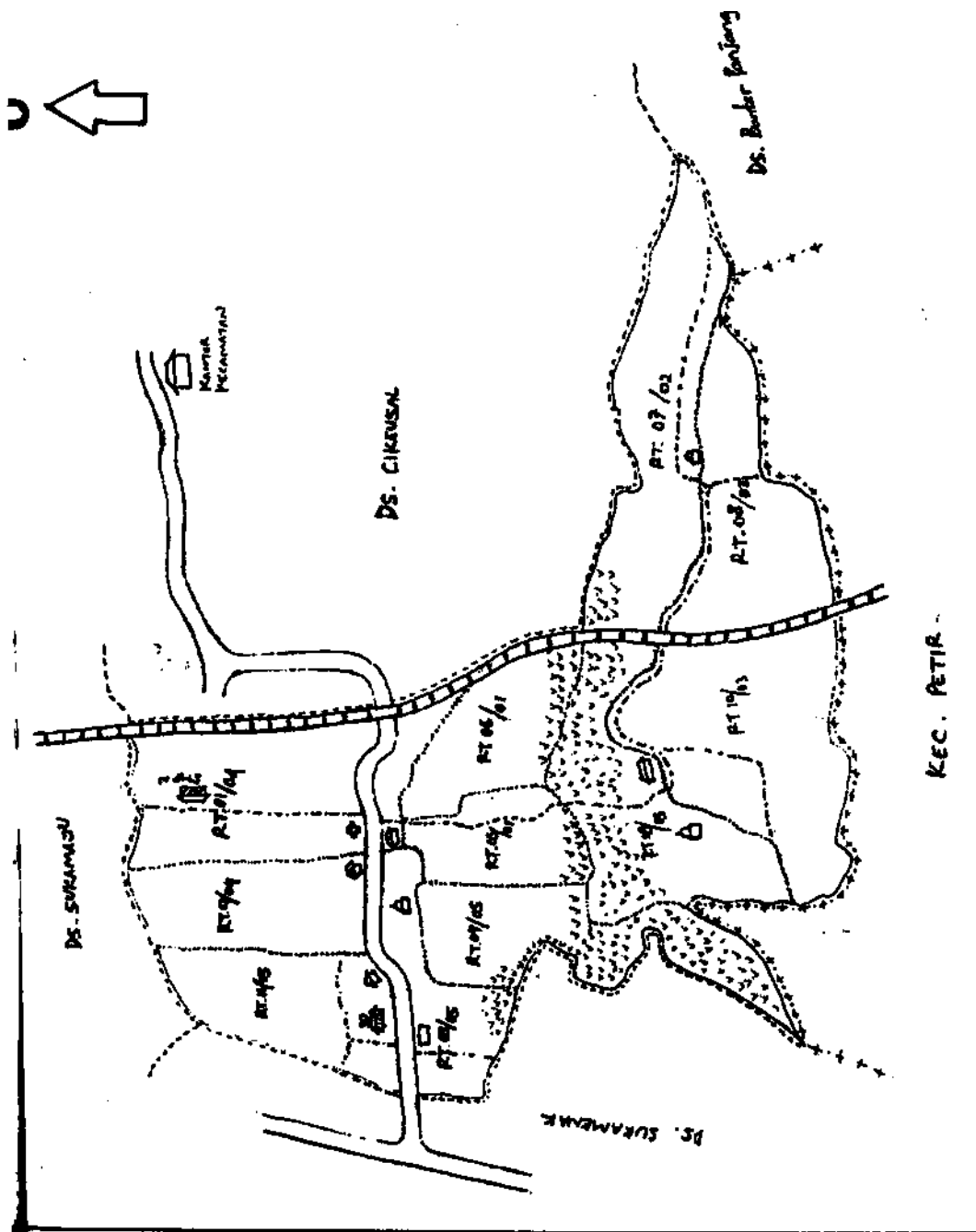
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.877 ^a	.458	.452	2,72568

a. Predictors: (Constant), Part_Masy

b. Dependent Variable: Keberh_Pemb

7. Grafik daerah penerimaan dan penolak Uji Hipotesis





---+---	: Batas Kecamatan
---	: Batas Desa
---	: Batas RT
---	: Jalan Otonom
---	: Jalan Desa
△	: Kantor Desa
▭	: Sekolah
▭	: Polsek
▭	: Masjid
▭	: Puskesmas
VVV	: Area Persewaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program studi : 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Phone (0254) 280330 Ext.228, fax (0254)281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : /UN..43.6.1/PG/2014

12 April 2014

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.

Ijin Mencari Data

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan.

Nama : **MUKHTIADI**
NIM : 6661072816

Semester : XIV
Mata Kuliah : SKRIPSI
Judul : Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pembangunan Fisik di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Banten
• Data : Jumlah Penduduk Tiap RT
Diperlukan : Jumlah Penduduk Wanita dan Laki-laki
Jumlah Fasilitas Pendidikan
Ruas jalan Desa Sukaratu
Jumlah Fasilitas Kesehatan
Dan data pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh peneliti

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak / Ibu untuk dapat memberikan **Izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, S.IP, M.Si
NIP. 197407052006042011

MEMBERCHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Sudrajat

Jabatan : Sekretaris Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang

Membenarkan telah dilakukan proses wawancara untuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh nama yang disebutkan dibawah ini :

Nama : Mukhtiadi

Pekerjaan : Mahasiswa

Dan saya tidak keberatan nama saya dicantumkan dalam dalam penelitian ini.






Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan semestinya, semoga dapat digunakan untuk keperluan keabsahan data dalam penelitian ini

Serang, 20 April 2014



Endang Sudrajat
Nip. 197810052009061001






PANDUAN SKRIPSI

No	Hari, Tgl	Uraian/Catatan Pembimbing	Paraf Dosen
1	Kamis 10/11/11	Dalam Bab 1 jangan terlalu banyak konsep dan teori, yang harus ada lebih kepada kondisi objek yang merupakan pada rumusan masalah	
2	Selasa 13/11/11	Bab I diperbaiki Kob I s/d III selanjutnya ke P66 II July	
3	Kamis 05/04 2012	Eksplorasi tentang teori harus mempunyai landasan yang kuat tentang teori partisipasi	
4	Kamis 31/05 2012	Dari tabel membuat konsi DASAR di depan	
5	Senin 10/10/11	TABEL disimpulkan dan kondisi di lapangan, harus saling berkesinambungan	

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 (tujuh) kali/total 14 (empat belas) kali

No	Hari, Tgl	Uraian/Catatan Pembimbing	Paraf Dosen
6.	Selasa 6-11-12	Kerangka teori harus dipelajari dengan benar.	
	Selasa 27-11-12	Identifikasi masalah harus ada pada latar belakang masalah.	
		Pertanian Ketanaka Berpikir Perlu di Pahami	
	28-02-13	REVISI & BOKUS BAB 1	
	Kamis 07-03-13	REVISI BAB 1 Jangan ada teori di BAB 1	
	10/03/13	MASUK KETANAKA Berpikir di Perbaiki dan mika masalah dari pembimbing Satu.	

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 (tujuh) kali/total 14 (empat belas) kali

No	Hari, Tgl	Uraian/Catatan Pembimbing	Paraf/Dosen
	1 Kamis 07.11.2013	Perbaiki sesuai sistematika penulisan skripsi sesuai dengan pedoman	
	21.11.2013	Revisi kerangka berpikir - sesuai dengan yang ada di teori	
	28.11.2013	Revisi kerangka berpikir	
		— u —	
	05-12-13 RABU	ACC proposal	
	06.12.13	Intjut seminar Questioner, 1 variabel di buat lebih 2 variabel revisi kerangka berpikir	
			

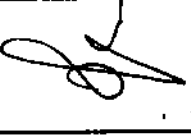
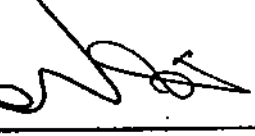
Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 (tujuh) kali/total 14 (empat belas) kali

PANDUAN SKRIPSI

No	Hari, Tgl	Uraian/Catatan Pembimbing	Paraf Dosen
	12-12-2013 KAMIS	Acc [unclear]	
	12-02-2014	Acc revis	
	13-02-2014	Acc ke Lap.	
		Acc ke [unclear]	
	03-05-2014	Uraian tidak masuk tapi di tulis dan disorotkan - tambahkan literatur - Rujukan dalam bentuk daftar pustaka, dan di sorotkan saya, observasi 2013.	
	14-05-2014	Acc Bab IV - Lanjut Bab V	
	21-05-2014 23-05-	Revisi Bab V - Revisi Subbab II	

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 (tujuh) kali/total 14 (empat belas) kali

REVISI: 10/01/2019

NO	HARI/TGL	URAIAN	ITD
	Juni 23-06 2014.	Maf Supri primary de - longi vepth II	
	06-01-06 2019.	acc. Kec Gunung.	
	06-01-06 2019.	ACC Siring	

NO	HARI/TGL	URAIAN	ITD